PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta program Asta Cita melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;

b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di tingkat Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 11);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana ...

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.

27. Program ...

27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan *output* langsung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat PD dalam perubahan perencanaan pembangunan tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah:

a. mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, subkegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) triwulan;
b. mengintegrasikan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Tahun 2025 ke dalam perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, untuk semester II (dua).

Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2025 berfungsi sebagai:

a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah Tahun 2025 pasca perubahan;
b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan
c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MUATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan perencanaan pembangunan tahun 2025 sesuai kewenangan bidang urusannya.

(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.

(3) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berkenaan.

(4) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:

a. kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;

b. subkegiatan sebelum dan sesudah perubahan;

c. target kinerja sebelum dan sesudah perubahan;

d. pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan; dan

e. lokasi dan kelompok sasaran sebelum dan sesudah perubahan.

Pasal 7

Isi beserta uraian Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Seluruh data program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi perubahan Renja PD Tahun 2025 tercantum dalam SIPD.

(2) Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 13 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, dilakukan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja PD. Khususnya Perubahan Renja PD Tahun 2025, memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang dituangkan dalam Renstra PD Tahun 2025-2029, yang secara simultan terkoordinasi dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang disusun dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu:

a. pemenuhan anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
b. mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;

c melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2029;

d. melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat;

e. alokasi anggaran diprioritaskan pada belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;

f. pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga; dan

g. kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam.

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 mengakomodir adanya perubahan-perubahan penambahan dan/atau pengurangan rincian subkegiatan akibat adanya perubahan target kinerja dan anggaran yang terjadi sejak ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2025 hingga pergeseran-pergeseran yang dilakukan dan tercantum dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang memperlihatkan sejauh mana pencapaian program, kegiatan dan subkegiatan, kemungkinan terlaksana atau tidak terlaksana, serta terselesaikan atau tidak terselesaikan pada akhir tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun 2025 yang wajib disusun untuk menjabarkan perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2024-2026. Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebuan Tahun 2025 disusun secara rutin sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan konkuren perangkat daerah berdasarkan bidang urusan/unsur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini disusun secara simultan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan periode perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Di sisi lain, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian teknis dalam perumusan substansi dokumen perencanaan daerah lainnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai implikasi dari akan berakhirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, serta perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan masih dipedomaninya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tata cara penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 tetap memedomani aturan dimaksud, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang harus diikuti oleh Perubahan Renja Perangkat Daerah terhadap substansi dokumen perencanaan daerah lainnya.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta tercantum dalam SIPD-RI.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan periode perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026, dimana tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih dan tahun pertama dalam dokumen perencanaan jangka panjang RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, yang secara simultan sedang dalam proses penyusunan. Untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi dalam proses perencanaan, substansi dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan menjadi bagian dari perubahan RPD Tahun 2024-2026. Disamping itu, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran, mulai dari tahapan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dinas, hingga RKA Tahun 2025, serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang mepedomani perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Selanjutnya, perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan,

sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ketentuan Pasal 1 Nomor 30 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Perubahan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rancangan Awal Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan awal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk periode tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini disusun dengan tetap mempedomani perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025. Dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Serta sebagaimana dalam Pasal 13 ayat

(2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupten Bogor Tahun 2025 berpedoman pada perubahan Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada perubahan Renstra, juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah akan dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hasil dari Forum Perangkat Daerah merumuskan usulan-usulan untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2025. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendukung tujuan daerah yang kedua yaitu **"Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah"** yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu "**Meningkatnya Ketahanan Pangan**". Dalam menentukan keburuhan anggaran dan program prioritas serta batas maksimal anggaran yang dianggarkan dalam Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah berpedoman pada RKPD 2025.

Bahwa Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 telah terintegrasi dengan RKPD, dan telah mengacu pada perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 2024-2026 serta perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, juga telah sesuai prioritas pembangunan **Provinsi Jawa Barat** yang terkait yaitu : **"Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata" dan "Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah"** serta sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang terkait yaitu : **"Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan" dan "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik"**. Selain itu dalam penentuan anggarannya telah sinkron dengan RKPD Kabupaten Bogor 2025. Dalam Perubahan Renja turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi yang baru sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL Desember 2021

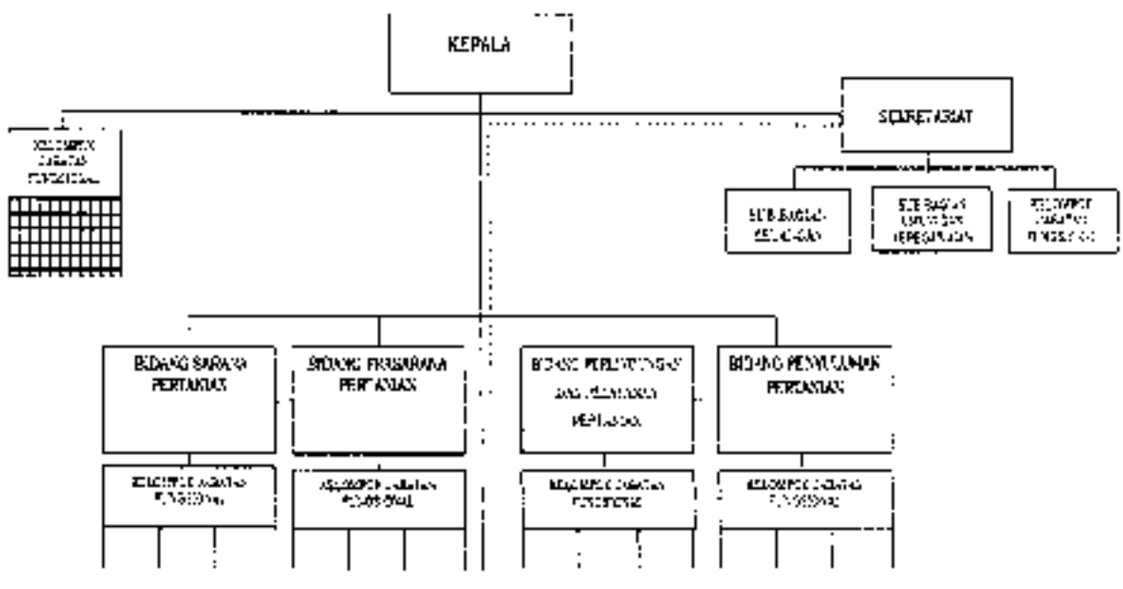

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lemberan Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikkultura dan Perkebunan kabupaten Bogor;
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2025;
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2025.
21. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Nomor : 800.1.11.1/22930-Sekret tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Nomor : 800.1.11.1/16.SK-Sekret tentang Pembentukan Tim Kerja Program dan Pelaporan di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pekebunan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja ini yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan bahan RAPBD tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja ini yaitu :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2025;
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2025;
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Perubahan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
II. Hasil Evaluasi Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Triwulan IV Tahun 2025
2.1 Capaian Kinerja Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Triwulan IV Tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
III. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
IV. Perubahan Renja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

2.1 Capaian Kinerja Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Triwulan IV Tahun 2025

Kondisi hingga triwulan IV (empat) tahun 2025 telah dilaksanakan 6 program dan 15 kegiatan serta 71 sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 dengan pagu belanja total sebesar Rp. 101.557.142.152,- yang terdiri dari pagu belanja operasi sebesar Rp. 91.927.677.421,- dan pagu belanja modal sebesar Rp. 9.629.464.731,-. Adapun komponen pagu anggaran belanja operasi tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 34.120.944.232, dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 57.806.733.189,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp 99.627.229.950,- yaitu 98,10%, dari total pagu. Berdasarkan realisasi capaian fisik sampai dengan triwulan IV tahun 2025, hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai 100%.

Tingkat capaian kinerja tujuan, sasaran, dan program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada triwulan IV tahun 2025 sebagian besar sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor s/d Triwulan IV Tahun 2025

No	Tujuan, Sasaran, dan Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	Tujuan :				
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	710.189 Ton	787.942 Ton	110,95
	Sasaran :				
1	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	7,13 Ton/Ha	7,95 Ton/Ha	111,50
	Program :				
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	17,24%	19,47%	112,94
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	16,55%	16,71%	100,97
3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	2,80%	4,43%	158,21
4	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	13,49%	17,53%	129,95
5	Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	1,80%	2,19%	202,78

6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	BB Predikat	100

Berdasarkan tabel di atas, maka tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2026 dalam rangka mencapai target kinerja antara lain :

1. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelanjutan sesuai penerapan SOP/GAP/GHP;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara masif dan berkelanjutan;
3. Menerapkan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan Berkelanjutan (LP2B) kepada masyarakat;
4. Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna mencekan resiko bencana pertanian;
5. Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan penyuluh pertanian dan petani millenial;
6. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya melalui standar operasional kegiatan sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian dalam pengembangan pertanian;
7. Meningkatkan keakuratan data statistik dalam pengelolaan pertanian.

Sejalan dengan tujuan kedua pemerintah Kabupaten Bogor yaitu **"meningkatnya produktivitas ekonomi daerah"** yang dijabarkan dengan sasaran ketiga daerah yaitu **"Meningkatnya Ketahanan Pangan"** yang sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dimana hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata, peningkatan daya saing dan

pelayanan publik yang berkualitas. Adapun hasil pencapaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2.2 terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 ditentukan dalam tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor s/d Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	710.189 Ton	787.942 Ton	110,95
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	7,13 Ton/Ha	7,95 Ton/Ha	111,50

Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yaitu adanya pertumbuhan usaha di sektor pertanian. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1) Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil.
2) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif.
3) Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian.

4) Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas.

5) Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.

Adapun uraian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai dengan triwulan IV tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2.1 terlampir.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam sektor pertanian tentunya sangat dipengaruhi juga oleh ketersediaan lahan. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi suatu tantangan yang cukup besar. Ketersediaan air dan kesuburan tanah pada lahan pertanian juga sangat penting, kondisi saat ini cuaca dan iklim tidak dapat diprediksi sehingga membutuhkan penerapan teknologi pertanian dan upaya untuk menambah pasokan air, antara lain melalui pembangunan infrastruktur seperti jaringan irigasi, embung ataupun dam parit serta teknologi lain yang memungkinkan. Permasalahan ketersediaan air ini tentunya perlu disinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kekurangan dan terjadi gagal panen, petani juga didorong untuk ikut dalam Asuransi Usaha Tani Pertanian (AUTP). Asuransi ini untuk mendorong kesejahteraan petani melalui perlindungan terhadap risiko kerugian nilai ekonomi usaha tani yang disebabkan karena gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan hama.

Selain itu, belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian juga menentukan keberhasilan program dan kegiatan Dinas, dimana sampai dengan saat ini masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian yang baik, menurunnya minat generasi muda

terhadap sektor pertanian, keterbatasan akses pemasaran petani, serta kurangnya permodalan petani. Sejauh ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah memfasilitasi petani untuk mengembangkan pemasaran melalui berbagai pameran baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Untuk tingkat Internasional, dinas membuka akses pemasaran kopi bogor, ini menjadi peluang besar bagi petani bogor untuk semakin mengenalkan produk lokal bogor dan meningkatkan pemasarannya. Di samping itu, pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu oleh penyuluh pertanian dan petugas lapangan lainnya tentunya membantu petani dalam mengelola lahan pertanian.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap permasalahan pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selain itu, perumusan isu-isu strategis juga didasarkan pada analisa kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu :

1. Strategi S-O
    a. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian;
    b. Peningkatan kualitas hasil olahan produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi;

c. Optimalisasi pengembangan sentra agribisnis dengan memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
d. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi;
e. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian;
f. Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian.

2. Strategi W-O
   a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengembangan pertanian;
   b. Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian;
   c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui standar operasional kegiatan.
3. Strategi S-T
   a. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis;
   b. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;
   c. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengelolaan potensi pertanian;
   d. Optimalisasi sumber daya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian.
4. Strategi W-T
   a. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian;
   b. Pemantapan data sebagai dasar pengelolaan pertanian dan kehutanan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi : analisa renstra Kementrian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam menghadapi persaingan pasar global;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun Dampak Penanggulangan Iklim (DPI);
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air;
5. Peningkatan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan akses pasar dan permodalan bagi petani;
7. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian;
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan;
9. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
10. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian;
11. Penurunan tingkat kehilangan hasil pertanian;
12. Pelayanan ijin usaha pertanian.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Jumlah anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam usulan Perubahan Renja Tahun 2025 telah sesuai dengan jumlah anggaran dalam dokumen perubahan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dinas yaitu sebesar Rp 101.557.142.152,- yang terdiri dari 6 program, 15 kegiatan, dan 71 sub kegiatan. Adapun nomenklatur program masih tidak ada

perubahan, akan tetapi terdapat perubahan pada sasaran dan indikator program, sasaran dan indikator kegiatan, serta rincian sub kegiatan baik pada indikator sub kegiatan maupun target kinerja. Sedangkan pagu indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahap perubahan penjabaran atau parsial III APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 101.557.142.152,-.

Analisis kebutuhan sebagaimana diatas merupakan hasil sinkronisasi perumusan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah untuk menajamkan usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penjaringan aspirasi masyarakat terhadap perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dihimpun melalui jalur partisifatif yaitu melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bogor tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, melalui jalur partisipatif dapat dihimpun sejumlah usulan kegiatan dari 40 kecamatan maupun masukan dari perangkat daerah.

Selain melalui jalur partisipatif, penjaringan aspirasi juga dilakukan melalui jalur politik. Penjaringan aspirasi ini dilakukan oleh DPRD melalui reses di daerah pemilihan serta janji Bupati melalui kegiatan pertemuan langsung dengan masyarakat yang diakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Akan tetapi pada tahun 2025 jalur politis tidak ada usulan kegiatan. Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan tersebut dilakukan seleksi untuk mensinkronkan usulan masyarakat dengan prioritas pada target kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Beberapa usulan belum dapat diakomodir dan dijadikan prioritas pada rencana kerja tahun 2025. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran tahun pelaksanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode teknokratik RPJMN tahun 2025-2029. Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan nasional pada tahun 2025 2029 yang meliputi: 1. Transformasi Sosial; 2. Transformasi Ekonomi; 3. Transformasi Tata Kelola; 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan 5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Adapun capaian agenda pembangunan nasional ditandai oleh 6 (enam) indikator makro, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan Nilai Tukar Petani.

Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) Tahun 2025-2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana kondisi kebutuhan bahan pangan saat ini semakin meningkat, namun dihadapi oleh kondisi alih fungsi lahan yang semakin tinggi, harga komoditas pangan yang cenderung meningkat, serta cadangan beras pemerintah yang semakin terbatas.

Adapun dasar – dasar strategi pembangunan nasional adalah :

1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah;
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
3. Membangun dari desa;
4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatif, dan penerapan teknologi yang tepat;
5. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

Adapun prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Strategi alokasi pada prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan;
3. Memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan;
4. Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia.

Fokus alokasi pada prioritas pembangunan nasional adalah :

1. Pembangunan sektor unggulan, yaitu :
- Kedaulatan pangan
- Energi ketenagalistrikan
- Kemaritiman

  Pariwisata
2. Pembangunan kebutuhan dasar, yaitu :
- Pendidikan
- Kesehatan

  Perumahan
3. Pengurangan kesenjangan, yaitu :
- Antar kelompok pendapatan
- Antar wilayah

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah .

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. Sinergi SDM dan IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu;

I. *Economically Feasible*, dengan ciri :
   a. Program-program yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
   b. Mempunyai nilai tambah tinggi;
   c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
   d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.

2. *Social Acceptable*, dengan ciri :
   a. Tidak menimbulkan masalah baru;
   b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
   c. Mengurangi kemiskinan;
   d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
   e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas;
   f. Meningkatkan keharmonisan masyarakat;
   g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.
3. *Environmentally Sustainable*, dengan ciri :
   a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (*carrying capacity*);
   b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
   c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (*sustainable*).

Arah kebijakan yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan dalam sembilan bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 2045. Bidang yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan prioritas peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan, SDM pertanian dan peternakan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu: 1. Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam

Bauran Energi Primer; 2. Efisiensi Energi; 3. Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan; 4. Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan; 5. Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan; 6. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon; 7. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru; 8. Pengembangan Industri Hijau; 9. Dan Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular.

Arah kebijakan dalam rangka pencapaian target Nilai Tukar Petani menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga yang diterima dan sisi harga yang dibayarkan oleh petani. Kebijakan dari sisi harga yang diterima berorientasi pada upaya yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, serta menjaga stabilisasi harga yang diterima. Kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan sentra produksi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (2) bilirisasi komoditas pertanian berbasis bioindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas; (3) pengembangan kelembagaan ekonomi petani menjadi korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk pertanian; dan (4) pengembangan ketertelusuran produk pertanian bernilai tambah seperti nilai budaya (*Globally Important Agricultural Heritage Systems*), geografis/endemik (Indeks Geografis), ataupun keberlanjutan (pertanian organik).

Kebijakan dari sisi harga yang dibayar petani berorientasi pada upaya yang menjamin keterjangkauan input usaha tani meliputi (1) modernisasi akses pembiayaan usaha pertanian melalui digitalisasi akses pembiayaan serta kemitraan dengan agen sumber pembiayaan; (2) pengendalian inflasi produk agro input melalui peningkatan produksi dan akses pupuk, pestisida, benih, serta sarana dan prasarana; (3) reformasi subsidi pupuk dan input pertanian lainnya melalui Bantuan Langsung Petani; dan (4) modernisasi pertanian melalui praktik pertanian presisi dan praktik pertanian konservasi agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan.

Secara ringkas target indikator pembangunan nasional pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,6%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5–5,0%; 3. Tingkat

Kemiskinan 7,0-8,0%; 4. Rasio Gini 0,379-0,382 poin; 5. Indeks Modal Manusia 0,56 poin; 6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6%; 7. Nilai Tukar Petani 113-115; (Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Peta Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan keluarga petani;
2. Meningkatnya ketahanan pangan nasional;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional;
4. Stabilnya harga komoditas pertanian strategis;
5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional;
7. Dimanfaatkannya inovasi teknologi;
8. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan;
9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman;
10. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
12. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Keterkaitan antara arah kebijakan nasional dengan kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dengan mempedomani program program yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra perangkat daerah.

Selain kebijakan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah Tujuan Keempat yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital

dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Adapun strategi bidang pertanian yaitu :

1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat;
2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/ produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
2. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode perencanaan jangka menengah provinsi tahun 2025-2029. Tema pembangunan Jawa Barat tahun 2025 adalah **"Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat"**, dengan target kinerja makro sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,81 %.
2. Kemiskinan sebesar 7,13 %.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,88 %.
4. Indeks Gini sebesar 0,383 %.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,39 poin.
6. Pendapatan per Kapita (ADHB) sebesar 61,57 juta.

Adapun tujuan pembangunan Jawa Barat tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang Berkualitas dan Didukung oleh Inovasi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rancangan kinerja tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
   a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
   b. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
   d. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
   e. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
   f. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura;
   g. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan;
   h. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
   i. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
   j. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;
   k. Penilaian Kultivar SDG Hewan;
   l. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
   m. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan;
   n. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
   o. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
   p. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;

q. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
r. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
s. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi;
t. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
u. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan;
v. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
w. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor;
x. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan;
y. Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
z. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
aa. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
bb. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
   a. Penataan Prasarana Pertanian;
   b. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
   c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
   d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani;
   e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani;

f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan;
g. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
h. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian;
i. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
k. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya;
l. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
m. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;

3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, dengan indikasi kegiatan:
   a. Penjaminan Keschatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
   b. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
   c. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
   d. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
   e. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;
   f. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
   g. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
   h. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi;
   i. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;

j. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;
k. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan;
l. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;
m. Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner;
n. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan;
o. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
p. Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
q. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya;

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
   b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
   c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
   d. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
   e. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
   a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
   c. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota;
   d. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;
   e. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;

f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Keschatan Hewan dan Keschatan Masyarakat Veteriner;
g. Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium;
h. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
j. Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan;

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
   a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
   b. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Perranian ASN;
   c. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;
   d. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
   e. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian;
   f. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani;
   g. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan;
   h. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani;
   i. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani;
   j. Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani;
   k. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Keterkaitan antara arah kebijakan Provinsi Jawa Barat dengan kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor berdasarkan perubahan renstra perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 dibuat dengan mempertimbangkan, mendukung dan mengakomodir serta bersinergi dengan Kebijakan Nasional maupun Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045. Tema RKPD Tahun 2025 adalah **"Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik"**. Adapun tujuan dinas adalah **"Meningkatnya produk pertanian"**. Adapun sasaran dinas adalah **"1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan 2. Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah"**.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2025 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Tujuan :**
   a. Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (ton).
2. **Indikator Sasaran :**
   a. Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha).
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (poin).

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 dan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pencapaian perubahan renstra 2024-2026 mengacu pada tujuan kedua yaitu **"Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah"** yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu **"Meningkatnya Ketahanan Pangan"**. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan

renstra melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :**

   A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
      a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
      b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
      c. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

   B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
      a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
      b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;
      c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :**

   A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
      a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B;
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
      c. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.

   B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
      a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
      b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
      c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
      d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
      e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air.

3. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :**
   A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
      b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
      c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. **Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :**
   A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
      b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
      c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
5. **Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :**
   A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :
      a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
      b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
      c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
      d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
      e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;
      f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota;
      g. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;
      h. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pengadaan Mebel;
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun uraian perubahan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 3.1 terlampir.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Penyusunan dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan perubahan renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 dan perubahan RPD tahun 2024-2026 serta dokumen perencanaan jangka panjang tahun 2025-2045 maupun perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan rencana kerja tahun 2025 melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan perubahan renstra perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :**
   A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub keg :
      a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
      b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
      c. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.
   B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
      a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman;
      b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;
      c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :**

   A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

      a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B;

      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;

      c. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.

   B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

      a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;

      b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

      c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;

      d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;

      e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air.

3. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :**

   A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

      a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

      b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

      c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. **Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :**

   A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

      a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;

b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;

c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;

c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;

d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;

e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;

f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota;

g. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;

h. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pengadaan Mebel;
   d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap perubahan RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 maka perubahan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 terdiri atas 6 program dan 15 kegiatan dan 71 sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Adapun usulan anggaran yang diajukan pada

perubahan renja sebesar Rp. 101.557.142.152,- dengan sumber dana APBD Kabupaten Bogor. Sedangkan pagu indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahap perubahan penjabaran atau parsial III APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 101.557.142.152,-. Adapun uraian usulan perubahan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 dengan disertai alasan perubahannya ditunjukkan pada Tabel Kertas Kerja terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang juga merupakan tahun pertama pencapaian target visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, yang dituangkan sebagai tahun pertama dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja sehingga realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan akan sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan bermanfaat, khususnya bagi pertanian di Kabupaten Bogor, dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR,

BUDI SUSMANTO

KERTAS KERJA PERUBAHAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2025

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN : PERTANIAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian**	**Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi**	**Rata-rata [(Luas lahan yang diberikan bantuan / Luas areal tanam tahun ke-R) x 100%]**	%	12,35	40.272.515.162	12,35	44.486.831.914	-	1.214.316.752	
1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Tercapainya luasan areal tanam**	**Jumlah luas areal tanam**	**Data tunggal (luas areal tanam pada tahun ke-z)**	ha	99.300,00	26.191.463.922	99.300,00	38.116.411.773	-	- 10.975.031.750	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya pupuk dan pestisida untuk didistribusikan kepada kelompok tani	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	Data tunggal	laporan	1,00	23.300.412.189	1,00	13.214.460.439	-	- 10.085.951.750	Berdasarkan hasil analisis anggaran berkurang 10 M karena volume pupuk cukup 139.047 liter dan CPCL belum memenuhi syarat
			Jumlah pestisida yang didistribusi		jenis	2,00		2,00		-	-	
			Jumlah pupuk hayati cair non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani		liter	291.027,00		159.047,00		- 131.980,00	-	
			Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani		ha			-		-	-	
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verpal Pupuk Subsidi		orang			-		-	-	
			Jumlah pupuk organik non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani		ha			3,00		3,00	-	
			Jumlah kapur pertanian non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian		ha			-		-	-	
			Jumlah sosialisasi pertanian organik		orang			-		-	-	
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tersedianya alsintan untuk didistribusikan kepada kelompok tani	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Data tunggal	laporan	1,00	1.891.061.334	1,00	1.901.951.334	-	10.900.000	Bimtek ke Jogja dihapus dan dialihkan ke kultivator 1 unit, pompa air 1 unit, handsprayer 5 unit, dan traktor besar 6,5 HP sebanyak 5 unit
			Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian		jenis	8,00		8,00		-	-	
					unit			92,00		92,00	-	
								-		-	-	
2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat**	**Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat**	**Data tunggal (benih/bibit tanaman pertanian yang dikelola pada tahun ke-n)**	cluster komoditas	3,00	18.681.051.639	3,00	29.370.420.141	-	11.289.368.502	
3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil I)	Tersedianya benih/bibit pelaku yang dikembangkan	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang dipertanyak	Data tunggal	ton	1,00	691.634.417	1,00	684.924.417	-	- 6.710.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan kegiatan lanjutan tahun 2024 yang belum terbayarkan - Pengalihan belanja modal lantai jemur ke bangunan pengering karena tanah karena dalam proses pengeringan kacang tanah tergantung dengan kondisi cuaca
			Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)		ton	0,50		0,50		-	-	
			Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT		ton	0,50		0,50		-	-	
			Jumlah benih pada MT I yang dipropses sertifikasi (Mei-Juni)		ton	0,50		0,50		-	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN KERJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
			Jumlah benih padi NT II yang ditrowen sertifikasi (Okt-Nov)		ton	0,50		0,50		-	-	
			Jumlah Bangunan Pengering Benih Kacang Tanah		unit			1,00		1,00	-	
			Jumlah traktor roda 2		unit			-		-	-	
4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil V)	Tersedianya benih/bibit sayuran dan tanaman obat	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Data tunggal	VUB	2,00	828.689.015	2,00	718.916.515	-	- 109.772.500	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Menghapus produksi tanaman obat karena tidak tersedianya bibit/benih yang berlabel ungu
			Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag		poly'bag	3.000,00		3.000,00		-	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag		poly'bag	20.000,00		20.000,00		-	-	
			Jumlah sertifikasi benih sayur		unit	1,00		1,00		-	-	
			Jumlah penangkaran benih tanaman obat (usia 0-3 bulan)		jenis	1,00		-		- 1,00	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sepredi pada APBDP 2024)		poly'bag	10.000,00		10.000,00		-	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sepredi pada APBDP 2025)		poly'bag	4,00		-		- 4,00	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sepredi pada APBDP 2026)		poly'bag			-		-	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sepredi pada APBDP 2027)		poly'bag			-		-	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sepredi pada APBDP 2028)		poly'bag			-		-	-	
			Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sepredi pada APBDP 2029)					-		-	-	
			Jumlah perbanyakan tanaman obat rimpang yang diujicoba (usia 3-11 bulan)		jenis			4,00		4,00	-	
			Jumlah penangkaran benih tanaman obat (usia 5 bulan)		jenis			-		-	-	
			Jumlah sertifikasi benih tanaman obat		unit			-		-	-	
			Jumlah penangkaran benih tanaman sayuran		jenis			-		-	-	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VIII)	Tersedianya benih/bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Data tunggal	VUB	3,00	890.075.102	3,00	826.621.927	-	- 63.453.175	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Pengurangan bench kopi robusta sebanyak 4.000 pohon
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap olah		pohon	20.000,00		20.000,00		-	-	
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan		pohon	42.000,00		38.000,00		- 4.000,00	-	
			Jumlah kultivator		unit			-		-	-	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil III)	Tersedianya benih/bibit buah dan tanaman hias yang dikembangkan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Data tunggal	VUB	3,00	893.544.513	2,00	634.225.513	- 1,00	- 259.318.800	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi belanja pemataan lahan UPT IX
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Alpukat)		pohon	2.500,00		2.500,00		-	-	
			Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan		pot/poly'bag	2.000,00		2.360,00		360,00	-	
			Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Durian)		pohon	360,00		-		- 360,00	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN KERJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
5	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT WI XI)	Tersedianya benih/bibit padi yang bersertifikat	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Data tunggal	ton	60,00	1.203.000.000	40,00	1.176.162.000	-	- 26.840.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025
			Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar		ton	35,00		35,00		-	-	
			Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September		ton	25,00		25,00		-	-	
			Luas lahan pembenihan dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des		Ha	12,00		12,00		-	-	
			Jumlah bangunan dan mesin pengering (vertikal dryer)		paket			-		-	-	
			Jumlah mini combine harvester		unit			-		-	-	
			Jumlah bangunan penyimpan padi		unit			-		-	-	
6	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Data tunggal	laporan	1,00	989.999.440	1,00	873.372.440	-	- 114.627.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi dari pengurangan rehab bangunan
			Jumlah UPJA yang dibina		UPJA	14,00		14,00		-	-	
			Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki		unit	50,00		50,00		-	-	
			Jumlah mobil bengkel kelling		unit	1,00		1,00		-	-	
			Jumlah suku cadang yang difasilitasi		jenis	12,00		12,00		-	-	
			Jumlah alsintan untuk brigade		unit	8,00		8,00		-	-	
			Jumlah bimtek teknisi alsintan		kali	7,00		4,00		- 3,00	-	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WI VI)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Data tunggal	dokumen	1,00	565.779.067	1,00	477.207.732	-	- 88.571.335	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi dari pengurangan suku cadang
			Jumlah UPJA yang dibina		UPJA	14,00		14,00		-	-	
			Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki		unit	50,00		40,00		- 10,00	-	
			Jumlah suku cadang yang difasilitasi		jenis	7,00		7,00		-	-	
			Jumlah alsintan untuk brigade		unit	4,00		2,00		- 2,00	-	
			Jumlah bimtek teknisi alsintan		kali	3,00		2,00		- 1,00	-	
			Jumlah mobil bengkel kelling		unit			-		-	-	
			Jumlah alat perbengkelan		jenis			-		-	-	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WII X)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Data tunggal	dokumen	1,00	846.511.626	1,00	415.335.438	-	- 131.176.188	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi dari pengurangan suku cadang
			Jumlah UPJA yang dibina		UPJA	18,00		18,00		-	-	
			Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki		unit	60,00		60,00		-	-	
			Jumlah suku cadang dan alat perbengkelan		jenis	9,00		9,00		-	-	
			Jumlah alsintan untuk brigade		unit	4,00		3,00		- 1,00	-	
			Jumlah bimtek teknisi alsintan		kali	2,00		1,00		- 1,00	-	
			Jumlah mobil bengkel kelling		unit			-		-	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	SUMBER	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN KERJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
7	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terfektifnya benih/bibit tanaman pertanian	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dana tunggal	dokumen	3,00	11.471.816.669	2,00	23.561.654.159	-	12.089.837.500	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan benih/bibit mendukung swasembada pangan dan program bupati - Penambahan pada perubahan anggaran reguler untuk bimtek penangkar benih guna mendukung prog prioritas bupati tahun 2025-2029 (Rp. 225.000.000)
			Jumlah benih padi yang difasilitasi		ha	22.860,00		4.398,00		18.462,00	-	
			Jumlah benih cabai yang difasilitasi		ha	233,00		340,00		107,00	-	
			Jumlah jagung yang difasilitasi		ha	164,00		340,00		176,00	-	
			Jumlah bibit alpukat yang difasilitasi		ha	20,00		450,00		430,00	-	
			Jumlah bibit durian yang difasilitasi		ha	15,00		505,00		490,00	-	
			Jumlah bibit jala yang difasilitasi		ha	10,00		10,00		-	-	
			Jumlah bibit kopi yang difasilitasi		ha	10,00		70,00		60,00	-	
			Jumlah bibit manggis yang difasilitasi		ha	20,00		170,00		150,00	-	
			Jumlah bibit jambu kristal yang difasilitasi		ha			12,50		12,50	-	
			Jumlah bibit kemang yang difasilitasi		ha			-		-	-	
			Jumlah bibit kesemek yang difasilitasi		ha			-		-	-	
			Jumlah bibit mangga yang difasilitasi		ha			140,00		140,00	-	
			Jumlah bibit cengkeh yang difasilitasi		ha			65,00		65,00	-	
			Jumlah benih jagung hibrida yang difasilitasi		ha			306,20		306,20	-	
			Jumlah benih jagung manis yang difasilitasi		ha			75,00		75,00	-	
			Jumlah bibit jeruk yang difasilitasi		ha			110,00		110,00	-	
			Jumlah bibit rambutan yang difasilitasi		ha			50,00		50,00	-	
			Jumlah bibit lengkeng yang difasilitasi		ha			50,00		50,00	-	
			Jumlah bibit cabai yang difasilitasi		ha			40,00		40,00	-	
			Jumlah bibit bayam yang difasilitasi		ha			40,00		40,00	-	
			Jumlah bibit kangkung yang difasilitasi		ha			40,00		40,00	-	
			Jumlah bibit terung yang difasilitasi		ha			40,00		40,00	-	
			Jumlah bibit tomat yang difasilitasi		ha			40,00		40,00	-	
			Jumlah bibit mentimun yang difasilitasi		ha			40,00		40,00	-	
			Jumlah bibit Krisan yang difasilitasi		batang			-		-	-	
			Jumlah bibit aglonema yang difasilitasi		batang			-		-	-	
			Jumlah bibit anggrek yang difasilitasi		batang			-		-	-	
			Jumlah benih padi yang diproduksi (prog prioritas bupati)		kg			-		-	-	
			Jumlah bimtek penangkar benih		orang			90,00		90,00	-	
			Jumlah bibit manga yang difasilitasi					-		-	-	
			Jumlah bibit salak yang difasilitasi					-		-	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN KERJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian**	**Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi**	**(Akumulasi jumlah prasarana yang terpenuhi (38 unit) / Total prasarana yang terpenuhi (63 unit)) x 100%**	%	60,32	5.409.185.417	60,32	7.184.130.912	-	1.774.945.495	
3	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Tersedianya informasi pengembangan prasarana pertanian yang akurat**	**Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian**	**Data tunggal (data potensi prasarana pertanian pada tahun ke-n)**	dokumen	3,00	880.933.330	5,00	1.364.133.325	2,00	483.199.995	
8	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Data tunggal	dokumen	1,00	250.455.075	1,00	350.155.075	-	99.700.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan pada perubahan anggaran reguler untuk kajian revisi perda LP2B no 7 tahun 2019 (Rp.100.000.000)
			Jumlah pelaksanaan revisi perda LP2B no 7 tahun 2019		laporan			1,00		1,00	-	
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksanaanya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Data tunggal	laporan	1,00	350.473.200	1,00	335.473.200	-	- 15.000.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan anggaran pada perubahan anggaran reguler untuk penjadin mendukung revisi perda dan updating data irigasi (Rp.85.000.000)
			Jumlah luas penanganan lahan (blok produktif		ha	5,00		5,00		-	-	
10	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Tahapan Penyusunan Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Data tunggal	dokumen	2,00	280.006.050	2,00	678.506.050	-	398.500.000	- Efisensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan anggaran pada perubahan reguler untuk updating data irigasi teknis tersier dan kuarter (Rp. 400.000.000)
4	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terbangunnya prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan**	**Jumlah prasarana pertanian yang terbangun**	**Data tunggal (prasarana pertanian yang terbangun pada tahun ke-n)**	unit	21,00	4.528.252.087	27,00	5.819.947.587	6,00	1.291.745.500	
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terhabilitasi, dan terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Data tunggal	unit	9,00	1.775.803.244	13,00	2.202.483.244	4,00	576.680.000	- Efisensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Realokasi anggaran untuk irigasi perpipaan sebanyak 4 unit sebesar Rp. 600.000.000
12	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya jalan usaha tani pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Data tunggal	unit	6,00	1.401.006.833	6,00	1.401.006.833	-	-	
13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya DAM parit pertanian	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Data tunggal	unit	3,00	790.879.811	3,00	782.219.811	-	- 8.660.000	-Efisensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya pintu air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Data tunggal	unit	1,00	28.944.500	-	0	- 1,00	- 28.944.500	Efisiensi dari kegiatan dihapus)
15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya prasarana pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Data tunggal	unit	3,00	531.617.699	6,00	1.284.287.699	3,00	752.670.000	- Realokasi anggaran untuk green house sebanyak 4 unit sebesar Rp 750.000.000,-
5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Menurunnya risiko bencana pertanian**	**Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian**	**(Akumulasi luas lahan sawah yang diasuransikan (32.000 ha) / Total luas lahan sawah di Kabupaten Bogor (44.955,41 ha)) x 100%**	%	71,18	2.545.410.304	71,18	1.476.705.921	-	- 1.068.704.383	
6	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Terkalelanya cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian**	**Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian**	**Data tunggal (luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian pada tahun ke-n)**	ha	20.000,00	2.545.410.304	3.000,00	1.476.705.921	- 17.000,00	- 1.068.704.383	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
16	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil I)	Terlaksanasnya gerakan dan diseminasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah luas serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Data tunggal	Ha	550,00	886.700.000	400,00	689.494.876	- 150,00	- 197.205.124	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi pengurangan anggaran : gerakan pengendalian 1 lokasi, diseminasi teknologi pengendalian OPT 5 lokasi, dan penerapan pengendalian OPT 5 lokasi
			Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		Gerakan	8,00		7,00		- 1,00	-	
			Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT		Kelompok Tani	12,00		7,00		- 5,00	-	
			Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		Kelompok Tani	12,00		7,00		- 5,00	-	
			Jumlah gudang yang dibangun		unit	1,00		1,00		-	-	
			Jumlah jaring burung yang dibudidaya		unit	240,00		246,00		6,00	-	
	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil XII)	Terlaksanasnya gerakan dan diseminasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah luas serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Data tunggal	Ha	600,00	541.239.370	300,00	438.709.361	- 100,00	- 102.530.009	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi pengurangan anggaran : gerakan pengendalian 7 lokasi dan diseminasi teknologi pengendalian OPT 5 lokasi
			Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		Gerakan	15,00		10,00		- 5,00	-	
			Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT		Kelompok Tani	15,00		8,00		- 7,00	-	
			Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		Kelompok Tani	8,00		8,00		-	-	
	-		Jumlah jaring burung yang dibudidaya		unit			300,00		300,00	-	
17	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terfasilitasinya penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Data tunggal	ha	20.000,00	967.471.859	3.000,00	319.760.359	- 17.000,00	- 647.711.500	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan dalam perubahan reguler untuk kajian mitigasi DPI (Rp. 100.000.000)
			Jumlah kajian mitigasi DPI		dokumen					-	-	
18	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terfasilitasinya penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Data tunggal	laporan	1,00	149.999.075	1,00	28.741.325	-	- 121.257.750	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Pengurangan dalam perubahan reguler berupa pompa air yang dialihkan ke tadang sarana (Rp. 58.545.250)
			Jumlah pompa air		unit	9,00		-		- 9,00	-	
			Jumlah peserta rakor dan sosialisasi penanggulangan pasca bencana pertanian		orang					-	-	
			Jumlah workshop penanggulangan pasca bencana pertanian		kali					-	-	
										-	-	
4	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Meningkatnya fasilitasi pelayanan izin usaha pertanian**	**Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian**	**(Akumulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang dibina pelayanan pertimbangan teknis (jin usahanya (107 pelaku usaha) / Total jumlah pelaku usaha pertanian yang dibina (162 pelaku usaha)) x 100%**	%	66,05	3.014.002.958	66,05	1.741.138.567	-	- 1.272.887.391	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
6	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mendapatkan sraban teknis**	**Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian**	**Data tunggal (jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan Izin usaha pertanian pada tahun ke-n)**	pelaku usaha	55,00	3.014.022.954	34,00	1.741.135.567	- 21,00	- 1.272.887.391	
19	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersedianya data dan informasi pertanian serta data kelompok tani	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok sasaran pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	Data tunggal	dokumen	6,00	377.609.530	8,00	277.432.830	6,00	- 100.246.800	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penarikahan dalam perubahan reguler untuk perjadin petugas pengimpul data lec (PPDK) (Rp 20.400.000)
20	Pemilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terfasilitasinya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Data tunggal	dokumen	1,00	1.800.028.380	1,00	742.083.932	-	- 847.939.648	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi pembinaan kepada kelompok tani sebanyak 23 kelompok tani
			Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi lahan komoditas hortikultura		pokan/pelaku usaha	23,00		15,00		- 8,00	-	
			Jumlah pelaku usaha perkebunan		perusahaan	32,00		10,00		- 22,00	-	
			Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (benih ASN)		poktan			9,00		9,00	-	
			Jumlah pameran		kali	2,00		2,00		-	-	
			Jumlah pemtenaan pokan kopi		poktan			-		-	-	
			Jumlah sertifikasi komoditas organik		poktan			-		-	-	
			Jumlah penilkan komoditas organik		poktan			-		-	-	
21	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT Wil IV)	Terlaksanaanya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Data tunggal	laporan	1,00	610.978.842	1,00	460.504.692	-	- 130.474.150	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Berkurangnya kegiatan studi tiru ke Sidoarjo dan sebagian kegiatan pemasaran online
			Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya		pelaku usaha	120,00		120,00		-	-	
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian		kali	10,00		6,00		- 4,00	-	
			Jumlah pemberdayaan keluarga miskin		KK	7,00		7,00		-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT Wil VII)	Terlaksanaanya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Data tunggal	laporan	1,00	435.318.906	1,00	261.092.113	-	- 174.226.793	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Berkurangnya kegiatan studi tiru ke Sidoarjo dan sebagian kegiatan pemasaran online
			Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya		pelaku usaha	120,00		70,00		- 50,00	-	
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian		kali	6,00		6,00		-	-	
5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian**	**Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian**	**(Jumlah petani (1.460) dan penyuluh (230) yang meningkat kompetensinya/ Jumlah petani yang terdata di simluhtan (91.923) dan total jumlah penyuluh (363) di Kab Bogor) x 100%**	%	1,85	9.154.128.970	1,83	7.217.199.366	-	- 1.936.929.604	
7	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian**	**Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian**	**(Jumlah kelompok tani yang meningkat skor penilaian kelas kemampuan kelompoknya (1.419 poktan) / Total kelompok tani di Kab. Bogor berdasarkan data simluhtan sampai dengan akhir tahun periode renstra (2.140 poktan)) x 100%**	%	66,30	9.154.128.970	66,30	7.217.199.366	-	- 1.936.929.604	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Data tunggal	unit	13,00	3.724.269.609	13,00	3.521.513.409	-	- 202.754.200	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi berupa temu wicara yang ditiadakan - Penambahan anggaran pada perubahan reguler yang mendukung pelaksanaan pentas tani dan mendukung Inpres No 3 Tahun 2025 (Rp. 76.075.000)
			Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas		orang	190,00		190,00		-	-	
			Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan (Tingkat Kab, Kec, dan Desa)		buku	533,00		533,00		-	-	
			Jumlah Fasilitasi rapat pertemuan 2 mingguan BPP		kali	286,00		286,00		-	-	
			Jumlah penyuluh pertanian yang terukur kinerjanya dalam melaksanakan tugas		orang	361,00		361,00		-	-	
			Jumlah penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa yang dinilai		paket	9,00		9,00		-	-	
			Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang disertifikasi		orang			-		-	-	
			Jumlah peserta sosialisasi perbup penyelenggaraan penyuluhan tingkat desa/kelurahan		orang			-		-	-	
			Jumlah peserta bimtek penyuluh pertanian		orang			-		-	-	
			Jumlah pelaksanaan pentas tani		kali			1,00		1,00	-	
			Jumlah Perjalanan Dinas Mendukung Inpres No 3 Tahun 2025		HOK			97,00		97,00	-	
23	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelompok tani dan kelembagaan lainnya di Kabupaten Bogor	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Data tunggal	kelompok tani	100,00	2.031.140.623	100,00	1.173.882.009	-	- 857.258.614	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan anggaran pada perubahan reguler untuk fasilitasi mimbar sarasehan KTNA dan RDKK tingkat kecamatan serta pendampingan dan pembinaan kelompok tani
			Jumlah pendaian petani milenial, gapoktan, posluhdes, dan petani berprestasi		paket	7,00		7,00		-	-	
			Terfasilitasinya kegiatan KTNA		kegiatan	2,00		1,00		- 1,00	-	
			Terfasilitasinya bibit untuk lomba-lomba tingkat provinsi		pohon/benih	2.100,00		2.100,00		-	-	
			Terfasilitasinya terusunnya dokumentasi RDKK		dokumen	2.259,00		2.225,00		- 34,00	-	
			Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi		Kategori	4,00		4,00		-	-	
			Terfasilitasinya pembinaan lomba tingkat kabupaten		Kegiatan	21,00		21,00		-	-	
			Terselenggaranya pelatihan bagi petani		Angkatan	2,00		1,00		- 1,00	-	
			Terselenggaranya HKP Tingkat Provinsi		Kali	1,00		-		- 1,00	-	
			Jumlah pelaksanaan mimbar sarasehan tingkat KTNA		Kegiatan	4,00		1,00		- 3,00	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN KERJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
24	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terfasilitasinya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Data tunggal	unit	52,00	1.349.775.037	6,00	821.795.942	- 46,00	- 887.979.095	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Penambahan anggaran pada perubahan reguler untuk perjadin yang memfasilitasi penyuluh dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian (Rp. 22.100.000)
			Jumlah lahan percontohan BPP (Green House) yang terbangun dan terpelihara		unit	4,00		-		- 4,00	-	
			Jumlah Gerapan BPP yang terfasilitasi		unit	8,00		6,00		- 2,00	-	
			Jumlah sarana radio		kali	30,00		-		- 30,00	-	
			Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lahan Perkantoran Dinas		paket	1,00		1,00		-	-	
			Jumlah bangunan pada lahan AFS yang terpelihara		unit	1,00		1,00		-	-	
			Jumlah Perjalanan Dinas Penyuluh/Koorluh yang terfasilitasi		bOK	1.040,00		520,00		- 320,00	-	
			Jumlah Penerapan Metodelogi Penyuluhan		Unit			-		-	-	
25	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Data tunggal	unit	35,00	522.949.670	3,00	330.248.350	- 10,00	- 192.701.320	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi sekolah lapang sebanyak 10 kegiatan
			Jumlah pelaksanaan panen raya		kali	1,00		1,00		-	-	
26	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Data tunggal	orang	150,00	481.604.650	130,00	908.230.075	-	426.625.425	- Penambahan DAK non fisik berupa bantuan operasional penyuluh sebesar Rp. 714.372.000
			Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi BOP (DAK Non Fisik)		orang			144,00		- 144,00	-	
			Jumlah peserta pelatihan spesifik lokalita		orang			-		-	-	
			Jumlah peserta bimtek kepemimpinan kelembagaan petani		orang			-		-	-	
27	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penguatan Kelembagaan penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Data tunggal	unit	13,00	85.900.000	-	0	- 13,00	- 85.900.000	- Efisiensi (sub kegiatan dihapus)
28	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Data tunggal	unit	1,00	60.198.800	1,00	37.569.700	-	- 22.629.100	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025
			Jumlah pelatihan pengembuhan dan pengembangan KEP		kegiatan	3,00		3,00		-	-	
			Jumlah pelaksanaan pendataan KEP		kegiatan	3,00		3,00		-	-	
29	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terpublikasikannya Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Data tunggal	dokumen	1,00	738.290.581	1,00	573.958.381	-	- 164.332.200	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025 - Efisiensi berupa menghapus kegiatan Petani Milenial

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
			Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial		kegiatan	3,00		1,00		- 2,00	-	
			Jumlah bintek dan deraplot cabai		paket	1,00		1,00		-	-	
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**Hasil Penilaian dari Inspektorat**	Point	74,55	49.923.877.523	74,55	50.537.220.742	-	613.343.219	
					Predikat	BB		BB		- BB	-	
8	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun** ---------- **x 100** **Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD**	%	100,00	361.996.584	100,00	295.499.837	-	- 266.496.747	Penambahan anggaran belanja makan dan minum sebesar Rp. 4.207.500 dan pengurangan belanja cetak sebesar Rp.3.570.910
30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data tunggal	dokumen	13,00	161.060.700	13,00	77.492.290	-	- 83.568.410	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025
31	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Data tunggal	dokumen	1,00	125.100.000	1,00	16.860.000	-	- 108.240.000	
32	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Data tunggal	dokumen	2,00	14.303.150	2,00	20.190.000	-	5.886.850	
33	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Data tunggal	dokumen	1,00	6.360.000	1,00	3.366.263	-	- 2.993.737	
34	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Data tunggal	dokumen	2,00	6.360.000	2,00	6.360.000	-	-	
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data tunggal	laporan	13,00	151.149.734	14,00	103.100.284	+ 1,00	- 48.049.450	
36	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data tunggal	laporan	17,00	97.663.000	17,00	68.131.000	-	- 29.532.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD**	**Persentase realisasi anggaran perangkat daerah**	**Jumlah realisasi anggaran PD** ---------- **x 100** **Jumlah target anggaran PD**	%	98,21	35.950.280.978	98,21	35.918.400.978	-	- 31.880.000	
37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Data tunggal	orang/bulan	223,00	35.620.944.233	220,00	35.620.944.233	-	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
38	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Data tunggal	dokumen ajuan bulanan	12,00	185.434.577	12,00	160.784.377	-	- 24.650.000	
39	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Data tunggal	dokumen	2,00	36.308.659	2,00	32.973.659	-	- 3.335.000	
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Data tunggal	laporan	1,00	3.749.650	1,00	1.889.650	-	- 1.860.000	
41	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Data tunggal	dokumen	1,00	2.750.500	1,00	1.060.000	-	- 1.690.000	
42	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Data tunggal	laporan	12,00	97.724.360	12,00	97.594.360	-	- 130.000	
43	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Data tunggal	dokumen	1,00	3.369.700	1,00	3.154.700	-	- 215.000	
10	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pengelolaan Aset yang Berkualitas**	**Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (Aset) yang Tercatat ---------- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah**	%	90,00	3.620.250	90,00	3.620.250	-	-	
44	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data tunggal	laporan	2,00	3.620.250	2,00	3.620.250	-	-	
11	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan kepegawaian**	**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu ---------- x 100 Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani**	%	100,00	361.653.850	100,00	170.031.850	-	- 391.650.000	Efisiensi anggaran
45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Data tunggal	unit	630,00	76.280.000	-	0	- 630,00	- 76.280.000	- Efisiensi (sub kegiatan dihapus)
46	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Data tunggal	paket	1,00	157.500.000	-	0	- 1,00	- 157.500.000	- Efisiensi (sub kegiatan dihapus)
47	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Data tunggal	dokumen	2,00	32.126.250	1,00	29.506.250	- 1,00	- 2.620.000	- Efisiensi (drop pengadaan flashdisk)
48	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Data tunggal	dokumen	2,00	16.824.000	2,00	7.924.000	-	- 8.900.000	- Efisiensi perjalanan dinas berdasarkan Inpres no 1 tahun 2025
49	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Data tunggal	orang	350,00	20.000.000	350,00	13.000.000	-	- 7.000.000	- Efisiensi (menguranngi frekuensi kegiatan senam)
50	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Data tunggal	orang	140,00	183.921.600	140,00	97.071.600	-	- 86.850.000	- Efisiensi (drop paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN KERJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
51	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Data tunggal	orang	10,00	73.000.000	3,00	22.500.000	- 7,00	- 52.500.000	- Efisensi (mengurangi jumlah peserta)
52	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi umum**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	**Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi ——————— x 100 Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditangathan**	%	100,00	1.681.366.648	100,00	1.873.183.561	-	191.916.513	
53	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Data tunggal	paket	1,00	96.220.950	1,00	96.220.950	-	-	
54	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Data tunggal	paket	3,00	257.962.250	3,00	257.962.250	-	-	
55	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Data tunggal	paket	1,00	36.276.250	5,00	209.365.263	4,00	173.089.013	
56	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Data tunggal	paket	2,00	114.838.386	2,00	114.838.386	-	-	
57	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Data tunggal	paket	2,00	55.219.612	2,00	55.219.612	-	-	
58	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Data tunggal	dokumen	1,00	25.440.000	1,00	25.440.000	-	-	
59	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Data tunggal	laporan	12,00	217.800.000	12,00	217.800.000	-	-	
60	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggarannya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data tunggal	laporan	2,00	813.518.000	2,00	813.518.000	-	-	- Penambahan fasilitas rapat virtual, ruang penyimpanan data, dan biaya langganan perangkat lunak serta hard disk - Penambahan anggaran pada perubahan reguler untuk memfasilitasi kekurangan tunjuhan perjadin dinas berupa undangan rapat serta koordinasi (Rp. 114.376.000)
61	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Data tunggal	dokumen	1,00	58.741.200	1,00	58.741.200	-	-	
62	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terfasilitasinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Data tunggal	dokumen	1,00	5.250.000	1,00	24.077.500	-	18.827.500	- Penambahan fasilitas rapat virtual, ruang penyimpanan data, dan biaya langganan perangkat lunak serta hard disk
63	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ——————— x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana**	%	100,00	5.431.864.825	100,00	5.619.647.578	-	187.782.753	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	APBD MURNI		USULAN PERUBAHAN RENJA		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
62	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Data tunggal	unit	3,00	303.480.000	3,00	303.480.000	-	-	
63	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Data tunggal	unit	5,00	166.974.000	-	0	5,00	166.974.000	Eliminasi (sub kegiatan dihapus)
64	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Data tunggal	unit	508,00	824.784.975	369,00	1.104.368.728	139,00	279.583.753	- Realokasi anggaran untuk sarana UPT
65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Data tunggal	unit	549,00	4.136.625.850	178,00	4.211.798.850	371,00	75.173.000	- Realokasi anggaran untuk sarpras dinas
14	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi / Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah x 100**	%	100,00	2.469.960.388	100,00	2.469.960.388	-	-	
66	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Data tunggal	laporan	12,00	712.155.000	12,00	712.155.000	-	-	
67	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Data tunggal	laporan	12,00	1.757.805.388	12,00	1.757.805.388	-	-	
15	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara / Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki x 100**	%	100,00	3.263.232.000	100,00	4.186.906.700	-	923.670.700	
68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Data tunggal	unit	175,00	684.500.000	176,00	684.500.000	-	-	
69	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Data tunggal	unit	11,00	2.282.041.000	15,00	3.196.346.700	4,00	914.305.700	- Realokasi anggaran untuk perbaikan pagar dinas, rehab BPP Ciawi, saranan dan taman
70	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Data tunggal	unit	294,00	296.645.000	295,00	306.060.000	1,00	9.365.000	
							113.319.140.334		112.643.224.423	-	675.915.912	

Tabel 2.1

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN : PERTANIAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Perubahan Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100	8
A	TUJUAN						
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	710.189	787.942	110,95	Indikator, target, dan satuan masih sesuai dengan dok renstra dan renja.
B	SASARAN						
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	7,13	7,95	111,50	Indikator, target, dan satuan masih sesuai dengan dok renstra dan renja.

Petunjuk Pengisian :

Kolom :

1 Diisi dengan nomor urut
2 Diisi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Tujuan dan indikator kinerja Sasaran PD
3 Diisi dengan satuan indikator kinerja utama PD
4 Diisi dengan Target indikator kinerja utama PD pada Renstra Tahun 2025
5 Diisi dengan realisasi indikator kinerja utama PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
6 Diisi dengan tingkat capaian indikator kinerja utama PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (dalam persen)
7 Diisi dengan penjelasan alasan jika capaian 0% atau <= 50% atau >100%

Tabel 2.2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN : PERTANIAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)	Satuan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
Indikator Tujuan				
1 Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	713.180	787.342	110.08
Indikator Sasaran				
1 Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	7.13	7.95	111.50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra K	Target Renstra Rp	Realisasi 2019 K	Realisasi 2019 Rp	Target 2020 K	Target 2020 Rp	TW I K	TW I Rp	TW II K	TW II Rp	TW III K	TW III Rp	TW IV K	TW IV Rp	Realisasi 2020 K	Realisasi 2020 Rp	Tingkat Capaian 2020 K (%)	Tingkat Capaian 2020 Rp (%)	Realisasi Renstra s/d 2020 K	Realisasi Renstra s/d 2020 Rp	Tingkat Capaian Renstra K (%)	Tingkat Capaian Renstra Rp (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
3	Pilihan																									
3 27	Pertanian																									
3 27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Bidang Sarana Pertanian	[illegible]
3 27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Bidang Sarana Pertanian	[illegible]
3 27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]				[illegible]					
		[illegible]					[illegible]						[illegible]													
3 27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		575.350.350		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]						[illegible]				[illegible]					
3 27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]						[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]		[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]						[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]		[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]		[illegible]				[illegible]					
3 27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]						[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]						[illegible]				[illegible]				[illegible]					
		[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]		[illegible]				[illegible]					

Kode					Uraian/Nilai Kinerja Pelayanan/Standar dan Program/Kegiatan	Indikator Output Program (Outcome) Program (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah (akhir tahun) dengan kondisi (Data)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun ini			Tingkat Capaian dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun (Akhir Tahun) (Data)			Realisasi Kinerja pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dae ah sampai akhir tahun ini (Akhir Tahun)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun ini (Akhir Tahun)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun Pertama dan Tanggal Perangkat Daerah Ditetapkan (Akhir Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019) (%)		Unit/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
																	I		II		III		IV													
							A	B	Rp	A	Rp	A	B	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp		
1					2		3			4		5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	07	01	1.01	01	Pengembalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah opt sasaran Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1.000	ha	1.625.454.010			400	ha	800.790.604		21.600.000	900	555.154.718	100	224.444.448	400	827.871.771	400	964.480.000	100,00	59,29	400	964.480.000	36,99	59,29	DPT Pelayaran Wilayah I	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
						Jumlah petugas pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	10	Orang				7	Orang		2		4		2		1		7													
						Jumlah lokasi fluktuasi hama penganggu OPT	10	Kecamatan/ Tahun				7	Kecamatan/ Tahun				1		7		1		7															
						Jumlah pelaporan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	12	Laporan/ Tahun				7	Laporan/ Tahun				1		7		1		7															
						Jumlah jenis yang diidentifikasi	5	Jenis				5	Jenis						5				5														
						Jumlah jenis/varietas yang dikendalikan	1.500	Jenis				350	Jenis				100						350														
1	07	01	1.01	04	Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Karantina Tanaman, Tumbuhan, dan Pekarangan (KATAN)	Jumlah opt sasaran Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Karantina Tanaman, Tumbuhan, dan Pekarangan (KATAN)	2.000	ha	1.625.351.000			600	ha	434.680.010	60	37.584.370	70	175.921.230	200	147.154.340	300	69.140.069	300	416.640.007	100,00	94,96	300	416.640.007	0,00	11,39	DPT Pelayaran Wilayah III	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
						Jumlah petugas pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	5	Orang/ Orang				2	Orang/ Orang		2		1		1		1		5													
						Jumlah lokasi fluktuasi hama penganggu OPT	10	Kecamatan/ Tahun				6	Kecamatan/ Tahun				1		3		1		6															
						Jumlah pelaporan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	10	Kecamatan/ Tahun				6	Kecamatan/ Tahun				1		3		1		6															
						Jumlah jenis yang diidentifikasi	5	Jenis				5	Jenis						5				5														
1	07	01	1.01	05	Pengawas Benih Tanaman (PBT) Varietas Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Unit Produksi Benih Sumber Pendukung Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	7.000	ha	7.351.115.454			1.750	ha	910.000.000		9.000.000		28.000.000		324.444.000	1.750,00	273.000.000	30,00	30,00	1.500	318.000.000	0,11	3,72	Kebun Tim Pembibitan Pertanian	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
					Penanggung jawab Pelaksanaan Kebijakan, Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur	Jumlah rekomendasi pengawasan benih bina, sebelum tebang, hasil tebang, dan sertifikasi sebagai sumber/kelas benih	5	Laporan	60.000.000			5	Laporan	60.000.000		9.000.000		9.000.000		12.000.000	1	60.000.000	100,00	100,00	1	60.000.000	10,00	13,33	Kebun Tim Pembibitan Pertanian	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
						Jumlah sumber benih	5	Unit				5	Unit																							
1	07	02			Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Diproduksi Produsen Benih/Penangkar	Jumlah produksi benih/tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang diawasi (produksi benih sumber, benih pokok, benih sebar)	1.000	ton/ha/unit/ batang	1.625.351.000			250	ton/ha/unit/ batang	1.000.700.000		10.000.000		30.000.000		350.000.000	77,00	1.000.000.000	100,00	100,00	770	1.000.000.000	13,33	1,90	Bidang Perbenihan dan Pelayanan Teknis	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
1	07	02	1.01		Pengawas Mutu Benih Tanaman Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih/tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang diawasi (produksi benih sumber, benih pokok, benih sebar)	1.000	ton/ha/unit/ batang	1.625.351.000			250	ton/ha/unit/ batang	1.000.700.000		10.000.000		30.000.000		350.000.000	77,00	1.000.000.000	100,00	100,00	770	1.000.000.000	13,33	1,90	Bidang Perbenihan dan Pelayanan Teknis	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
1	07	02	1.01	01	Pengawas Mutu Benih Tanaman Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan (Unit usaha perbenihan, kios sarana/alat, alat usaha, dan usaha/alat pembenihan)	5	Unit/ha	51.750.000	1	8.625.000	4	6.450.000		44.444.444	1	30.750.000	4	25.487.000	100,00	81,00	4	25.487.000	0,00	0,49	Kebun Tim Cabe dan Hortikultur	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
1	07	02	1.01	02	Pengawas Mutu Benih Tanaman Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pengujian Mutu Produksi Perbenihan Tanaman Pangan (Uji Laboratorium, Uji Lapang)	5	Laporan	51.750.000	1	8.625.000	4	6.450.000		44.444.444	1	30.750.000	4	25.487.000	100,00	81,00	4	25.487.000	0,00	0,49	Kebun Tim Pembibitan Dalam Perbenihan	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
						Jumlah laporan hasil uji/pengujian benih yang dilakukan	20	Laporan/ Tahun		5		5							5				20												
						Jumlah varietas yang diidentifikasi	20	Laporan/ Tahun		5		5							5				20												
						Jumlah produksi	5	Unit		1		1							1				4												
1	07	03	1.01	01	Pengawas Benih Tanaman (PBT) Kabupaten/Kota	Jumlah Jml. Unit/ Produksi Benih/ Bibit yang Diawasi	5	Laporan	3.625.324.546	1	50.000.000	1	150.000.000		77.924.000	1	100.125.000	1	64.000.000	10,00	8,00	1	64.000.000	0,07	0,00	DPT Pelayaran Wilayah II	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
						Jumlah calon varietas yang diusulkan dan dilepas/ ditarik/ dikembalikan	10	Varietas		10		10							10				10												
						Jumlah Pemeliharaan Kebun Induk/Pembibitan Induk/Kebun Benih	5	Unit		1		1							1				4												
						Jumlah pelaporan pengawasan benih	5	Laporan		1		1							1				4												
1	07	03	1.01	02	Pengawas Benih Tanaman (PBT) Provinsi	Jumlah Jml. Unit/ Produksi Benih/ Bibit yang Diawasi	5	Laporan	3.625.324.546	1	50.000.000	1	150.000.000		77.924.000	1	100.125.000	1	64.000.000	10,00	8,00	1	64.000.000	0,07	0,00	DPT Pelayaran Wilayah III	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal
						Jumlah calon varietas yang diusulkan dan dilepas/ ditarik/ dikembalikan	10	Varietas		10		10							10				10												
						Jumlah Pemeliharaan Kebun Induk/Pembibitan Induk/Kebun Benih	5	Unit		1		1							1				4												
						Jumlah pelaporan pengawasan benih	5	Laporan		1		1							1				4												
1	07	04			Penyelenggaraan Pengujian Benih Tanaman	Jumlah Pelaporan pengujian benih/tanaman	5.000		10.000.000.000			1.000		2.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	2.000	4.000.000.000	800,00	80,00	1.000	2.000.000.000	0,20	0,20	Bidang Perbenihan	Sebelum Penawaran Pengadaan Barang jasa atau Dibatal

Kode						Uraian/Sub-Kegiatan/Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Realisasi Perangkat Daerah sebagai Bahan Usulan (RLB)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai Bahan Usulan (RLB)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai Bahan Usulan (Tahun 2025 yang Berjalan)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Akan Dinilai (Tahun 2025)		Proporsi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Tahun 2025) Terhadap Target 5 Tahun (2025-20..)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (s/d Tahun 2024) (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025)		Proporsi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (s/d Tahun 2024) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	R	Rp	K	Rp	K	S	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	22
1	01	01	2.01			Pembinaan Penyelenggaraan Pemilihan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dengan baik	30.000	orang	30.000.000.000			7.497	orang	1.497.000.000	999	1.000.000.000	999,00	1.000.000.000	750,00	2.250.000.000	750,00	3.000.000.000	3.000,00	7.994.000.000	333,47	79,95	3.997	7.994.000.000	13,32	13,32	Bidang Pengendalian	Indikator dalam dan belum ada target dan realisasi
2	01	01	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Umum & Kesadaran dan Etika	Jumlah Kesadaran penyelenggara pemilihan di kecamatan dan desa yang terpublikasi	1	Unit	2.400.000.000			0	Unit	4.700.000.000	0	917.884.777	0	900.000.000	1	1.150.615.000	1	1.000.000.000	1	4.768.499.777	100,00	99,66	1	4.768.499.777	99,11	99,11	Bidang Tata Kelola pemilu	Indikator Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota
							Jumlah Personil Pemilihan (meliputi penyelenggara pemilihan)	10	orang				10	orang		750		750		750		750		10				750					
							Jumlah Dokumen Program Pemilihan (Tingkat Kab, Kec, dan Desa)	1	Dok.				1	Dok.								1		1				1					
							Jumlah Fasilitas (alat perlengkapan) kegiatan KPP	4	Unit				20	Unit		10		10		10		10		40				20					
							Jumlah tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas yang terkait	1	Orang				20	Orang								20		20				20					
							Jumlah honor personil (KKI, TU, TKPPS, dan PPS Kabkot)	1	Orang				1	Orang				1		1		1		3				3					
3	01	01	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kepemiluan Internal & Masyarakat dan Etika	Jumlah Kabupaten/ Kota di Indonesia dan Etika yang Terpublikasi Dipublikasikan	100	Kabupaten/ kota	2.451.000.000			70	Kabupaten/ kota	1.050.000.000		220.840.707		130.271.000	30	103.535.214	30	175.000.793	130	1.460.647.714	100,00	95,16	100	1.460.227.714	5,07	5,06	Bidang Tata Pemerintahan	Indikator Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota
							Jumlah Lembaga Pelatih di Kabupaten/ Kota (data yang Terupdate Dipublikasi)	1	Kabupaten				1	Kabupaten								1		1				1					
							Jumlah Pelatihan yang terselenggara	0	Kabupaten				0	Kabupaten								0		0				0					
							Jumlah Alat Peraga Pendidikan Pemilih (Buku, Leaflet, Poster, Flyer, Spanduk, Baliho, Video, Film, Permainan Interaktif, Dll)	1.000	Kabupaten/ kota				2.000	Kabupaten/ kota		1.000							3.000		3.000				3.000					
							Jumlah Kelompok Pemilih Pemula	1.000	Kelompok				1.000	Kelompok								1.000		1.000				1.000					
							Jumlah Lembaga Pendidikan yang terlibat	10	Kabupaten/ kota				10	Kabupaten/ kota								10		10				10					
							Jumlah Kelompok Pemilih Rentan	10	Kabupaten/ kota				10	Kabupaten/ kota								10		10				10					
							Jumlah Fasilitas (alat perlengkapan) kegiatan KPP	4	Unit				20	Unit		10		10		10		10		40				20					
							Jumlah tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas yang terkait	1	Orang				20	Orang								20		20				20					
							Jumlah honor personil (KKI, TU, TKPPS, dan PPS Kabkot)	1	Orang				1	Orang				1		1		1		3				3					
4	01	01	2.01	03		Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemilihan Pemilu	Jumlah Data Pemilih dan Pemilihan Pemilu	10	Unit	1.000.000.000			10	Unit	500.000.000	10	150.000.000	10	142.750.000	10	140.000.000	10	140.000.000	10	572.750.000	100,00	95,46	10	572.750.000	99,79	99,79	Bidang Tata Kelola Pemilu dan Pemantapan Pengelolaan	Indikator Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota
							Jumlah Dokumen DPT yang terfasilitasi	1	Unit				1	Unit		1		1		1		1		4				1					
							Jumlah Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem DTS yang terfasilitasi	1	Sistem				1	Sistem								1		1				1					
							Jumlah kegiatan sosialisasi DTS yang dilakukan	1	Unit				1	Unit				1				1		1				1					
							Jumlah Pengawas Desa Terpublikasikan yang terfasilitasi	123	Unit				123	Unit		70		100		10		30		300				300					
5	01	01	2.01	04		Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemilihan Umum	Jumlah Sistem Informasi Pemilihan Umum yang terfasilitasi dan terpelihara	10	Unit	2.000.000.000			10	Unit	400.000.000		80.179.000	0	32.100.000		90.987.000		23.333.000	0	226.599.000	100,00	56,65	10	226.599.000	4,01	4,01	Bidang Tata Kelola dan Pemantapan Pengelolaan	Indikator Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota

Kode					Uraian/Sebutan Urusan Pemerintahan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Hasil Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Standar Pelayanan Minimal (apabila terdapat target standar pelayanan minimal)			Realisasi Standar Pelayanan Minimal (apabila terdapat target standar pelayanan minimal)			Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah									Kondisi Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Belum Tercapai			Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019			Tindak Lanjut Perbaikan/Penyempurnaan	Ket
							Target Kinerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota			Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang akan dicapai Tahun 2020			I		II		III		IV		Realisasi Kinerja Renja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang ditentukan Tahun 2020		Tingkat Capaian Renja dan Anggaran Perangkat Daerah (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2020														
							K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25	
1	21	21	2.01	01	Pengadaan dan Penyaluran Kapasitas Fiskal (LC) Lainnya	Jumlah penyaluran pinjaman yang berasal dari delegasikan kepemerintah	100	Orang	3.611.272.000				20	Orang	466.538.675				0	14.000.000	Dok	340.540.777	20	111.997.898																			Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Untuk Pejabat Pengelola LC	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang disediakan untuk pejabat pengelola LC	1	Unit					1	Unit																												Belum Terdapat Alat Pendukung Pengadaan	Alat Pendukung Belum
1	21	21	2.01	03	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Tahun yang dirawat	3	Unit	1.227.140.000				3	Unit	81.900.000		2.960.000		1.510.000		6.360.000	1	70.110.000	1	37.712.727	100,00	71,95	1	37.712.727	5,00	0,00	Belum Ada Barang dan Prosedur Pengadaan	Belum ada pengadaan karena barang masih tersedia dan cukup
						Jumlah pakaian perorangan dan pengelolanya KDP	10	Pengelola					0	Pengelola										0															
						Jumlah sekretariat pendukung KDP	10	Pengelola					0	Pengelola										0															
1	21	21	2.01	04	Operasional Informasi Teknis, Sistem Informasi dan Arsitektur Informasi	Jumlah Dokumen informasi dalam bentuk elektronik dan konten pendukung	1	Dokumen	1.008.200.000				1	Dokumen	105.000.000			17.145.000		60.084.000		15.150.000	1	114.232.000	100,00	90,00	1	114.232.000	6,11	0,00	Belum Ada Barang dan Prosedur Pengadaan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
						Jumlah pakaian pakar informasi	10	Pengelola					0	Pengelola										0															
						Jumlah sarana dan sarana pakar	1	Paket					1	Paket										1															
1	21	21			Pengelolaan Pengelolaan dan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan	Nilai AKIP	100	Pemerintah	121.320.987.654				100	Pemerintah	47.000.000.000		5.172.250.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	107	36.401.250.000	116,00	91,00	107	36.401.250.000	100,00	91,00	Capaian	Indikator target dan nilai capaian sesuai dengan dan sesuai dan ada
1	21	21	2.01		Pemerintah, Pengunggun, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Rancangan, Pengadaan, Pengguna dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	100	%	200.511.000	30,00	10.267.000	32	10.150.000	30	12.000.000	30	12.000.000	100,00	200.000.000	32,00	80,00	100	200.000.000	100,00	1,00	Dan Progres dan Pelaporan	Indikator target dan nilai capaian sesuai dengan dan sesuai dan ada Capaian kinerja sesuai target
1	21	21	2.01	11	Fasilitasi Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Perangkat Daerah	13	Dokumen	154.334.700	13	Dokumen	35.240.000	4	8.000.000	4	30.000.000	4	30.457.000	4	17.000.000	13	84.000.000	100,00	53,00	13	84.000.000	100,00	1,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan (KLK (LKT)	Jumlah Dokumen RKA (DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA (LKT)	5	Dokumen	90.000.000	5	Dokumen	10.000.000	1			1	3.000.000	1	1.884.000	1	3.000.000	1	8.000.000	100,00	80,00	1	8.000.000	0,07	0,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	13	Fasilitasi dan Penyusunan Laporan Perangkat (RKA (LKT)	Jumlah Dokumen Tersedianya RKA (DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perangkat RKA (DPA)	5	Dokumen	111.000.000	5			1			1	10.000.000	1		1	1.000.000	1	13.844.000	100,00	80,00	1	13.844.000	0,07	0,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	14	Koordinasi dan Penyusunan (DPA (LKT)	Jumlah Dokumen DPA (DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA (LKT)	5	Dokumen	12.000.000	5	Dokumen	1.100.000	1			1		1		1	2.000.000	1	7.000.000	100,00	80,00	1	7.000.000	0,07	0,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan (DPA (LKT)	Jumlah Dokumen Tersedianya (DPA (LKT) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perangkat (DPA (LKT)	5	Dokumen	30.250.000	5	Dokumen	6.000.000	1			1		1		1	6.231.474	1	4.131.474	100,00	80,00	1	4.131.474	0,07	0,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKT)	10	Laporan	1.000.511.000	1	1.667.000	3	51.000.000	3	1.511.000	4	16.250.510	10	116.892.511	100,00	90,11	10	116.892.511	11,68	0,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi
1	21	21	2.01	17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahun Yang Perangkat Daerah	10	Laporan	40.510.110	1	Laporan	10.000.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	2.000.000	1	33.000.000	10	33.821.510	100,00	83,00	10	33.821.510	10,01	10,00	Belum Ada Progres dan Pelaporan	Sistem Pinjaman Pengadaan Barang jasa dan Dikonsi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Unsur dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun ke-5			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun ke-4		Target Anggaran yang Direncanakan Untuk Mencapai Sasaran Renstra Perangkat Daerah (Output) pada Tahun ke-5			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun ke-4		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang akan dicapai pada Tahun ke-5		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun ke-4 (Tahun 2024)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun ke-4		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV											
		K	T	Rp	K	Rp	K	T	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	01	1.1	1.1.01																								
1	01	1.1	1.1.01	01																							
1	01	1.1	1.1.01	02																							
1	01	1.1	1.1.01	03																							
1	01	1.1	1.1.01	04																							
1	01	1.1	1.1.01	05																							
1	01	1.1	1.1.01	06																							
1	01	1.1	1.1.01	07																							
1	01	1.1	1.1.01	08																							
1	01	1.1	1.1.01	09																							
1	01	1.1	1.1.01	10																							
1	01	1.1	1.1.01	11																							
1	01	1.1	1.1.01	12																							
1	01	1.1	1.1.01	13																							
1	01	1.1	1.1.01	14																							
1	01	1.1	1.1.01	15																							
1	01	1.1	1.1.01	16																							
1	01	1.1	1.1.01	17																							
1	01	1.1	1.1.01	18																							
1	01	1.1	1.1.01	19																							
1	01	1.1	1.1.01	20																							
1	01	1.1	1.1.01	21																							
1	01	1.1	1.1.01	22																							
1	01	1.1	1.1.01	23																							
1	01	1.1	1.1.01	24																							
1	01	1.1	1.1.01	25																							
1	01	1.1	1.1.01	26																							
1	01	1.1	1.1.01	27																							
1	01	1.1	1.1.01	28																							
1	01	1.1	1.1.01	29																							
1	01	1.1	1.1.01	30																							
1	01	1.1	1.1.01	31																							
1	01	1.1	1.1.01	32																							
1	01	1.1	1.1.01	33																							
1	01	1.1	1.1.01	34																							
1	01	1.1	1.1.01	35																							
1	01	1.1	1.1.01	36																							
1	01	1.1	1.1.01	37																							
1	01	1.1	1.1.01	38																							
1	01	1.1	1.1.01	39																							
1	01	1.1	1.1.01	40																							
1	01	1.1	1.1.01	41																							
1	01	1.1	1.1.01	42																							
1	01	1.1	1.1.01	43																							
1	01	1.1	1.1.01	44																							
1	01	1.1	1.1.01	45																							
1	01	1.1	1.1.01	46																							
1	01	1.1	1.1.01	47																							
1	01	1.1	1.1.01	48																							
1	01	1.1	1.1.01	49																							
1	01	1.1	1.1.01	50																							
1	01	1.1	1.1.01	51																							
1	01	1.1	1.1.01	52																							
1	01	1.1	1.1.01	53																							
1	01	1.1	1.1.01	54																							
1	01	1.1	1.1.01	55																							
1	01	1.1	1.1.01	56																							
1	01	1.1	1.1.01	57																							
1	01	1.1	1.1.01	58																							
1	01	1.1	1.1.01	59																							
1	01	1.1	1.1.01	60																							
1	01	1.1	1.1.01	61																							
1	01	1.1	1.1.01	62																							
1	01	1.1	1.1.01	63																							
1	01	1.1	1.1.01	64																							
1	01	1.1	1.1.01	65																							
1	01	1.1	1.1.01	66																							
1	01	1.1	1.1.01	67																							
1	01	1.1	1.1.01	68																							
1	01	1.1	1.1.01	69																							
1	01	1.1	1.1.01	70																							
1	01	1.1	1.1.01	71																							
1	01	1.1	1.1.01	72																							
1	01	1.1	1.1.01	73																							
1	01	1.1	1.1.01	74																							
1	01	1.1	1.1.01	75																							
1	01	1.1	1.1.01	76																							
1	01	1.1	1.1.01	77																							
1	01	1.1	1.1.01	78																							
1	01	1.1	1.1.01	79																							
1	01	1.1	1.1.01	80																							
1	01	1.1	1.1.01	81																							
1	01	1.1	1.1.01	82																							
1	01	1.1	1.1.01	83																							
1	01	1.1	1.1.01	84																							
1	01	1.1	1.1.01	85																							
1	01	1.1	1.1.01	86																							
1	01	1.1	1.1.01	87																							
1	01	1.1	1.1.01	88																							
1	01	1.1	1.1.01	89																							
1	01	1.1	1.1.01	90																							
1	01	1.1	1.1.01	91																							
1	01	1.1	1.1.01	92																							
1	01	1.1	1.1.01	93																							
1	01	1.1	1.1.01	94																							
1	01	1.1	1.1.01	95																							
1	01	1.1	1.1.01	96																							
1	01	1.1	1.1.01	97																							
1	01	1.1	1.1.01	98																							
1	01	1.1	1.1.01	99																							
1	01	1.1	1.1.01	100																							

Kode						Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Hasil/Output (Outcome/Output) Program	Target Hasil/Output Program dalam Rupiah dengan lokus (Lok)			Realisasi Hasil/Output Program (Outcome/Output) dengan lokus (Lok)		Target Hasil/Output dan Anggaran Belanja Langsung Program (Tahun 2025) yang Akan Dicapai			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								T	T	Rp	T	Rp	T	T	Rp	I	Rp	II	Rp	III	Rp	IV	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1	2					3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13		14		15	16
1	01	01	2.02	01		Penyediaan Komunikasi Aktivitas Lokal/Pemerintah Mengawasi Hukum	Jumlah Kabul, Conclusion Lokasi/Lokal/Kecamatan Mengawasi - Kantor yang Disediakan		Kantor	200,000,000				Kantor	80,000,000				0		0		0		81,147,500	100.00	84.73	1	81,147,500	100.00	0.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Untuk Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	02		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kabul Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Unit	1,000,000,000				Unit	307,992,000		318,700,000		0		0		0		320,700,000	100.00	83.80	1	342,000,000	15.00	15.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Untuk Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	03		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Kabul Tersedia Rumah Tangga yang Disediakan		Kantor	50,000,000				Kantor	17,910,671		5,827,000		0		12,134,000		23,910,000	0	12,670,000	100.00	57.50	0	23,972,000	30.00	15.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	04		Penyediaan Perlatan Logistik Kantor	Jumlah Kabul Sarana Logistik Kantor yang Disediakan		Unit	110,000,000				Unit	31,228,000		30,100,000		0		21,000,000		54,500,000	0	11,000,000	100.00	90.00	0	11,000,000	10.00	10.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kabul Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Dokumen	50,000,000				Dokumen	35,000,000		10,000,000		0		8,000,000		8,000,000	0	10,000,000	100.00	83.00	0	10,000,000	10.00	10.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	06		Penyediaan Sarana Prasana dan Prasarana Perkantoran Lainnya	Jumlah Dokumen Sarana Prasana dan Prasarana Perkantoran Lainnya yang Disediakan		Dokumen	70,000,000				Dokumen	30,000,000		4,000,000		0		3,000,000		8,000,000	0	15,000,000	100.00	100.00	0	15,000,000	10.00	10.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	08		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang Disediakan		Dokumen	1,000,000,000				Dokumen	317,000,000		61,000,000		0		0		255,000,000	0	68,000,000	100.00	85.00	10	313,000,000	100.00	10.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan		Dokumen	500,000,000				Dokumen	200,000,000		80,000,000		0		0		207,500,000	0	302,500,000	100.00	84.00	0	302,500,000	100.00	10.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	10		Pengadaan Alat Kebersihan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Dokumen	100,000,000				Dokumen	50,000,000				0		0		0		50,000,000	100.00	50.00	0	50,000,000	50.00	50.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	11		Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan		Dokumen	70,000,000				Dokumen	30,000,000				0		0		0		30,000,000	100.00	50.00	0	30,000,000	50.00	50.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	12		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Dokumen	100,000,000				Dokumen	50,000,000				0		0		0		50,000,000	100.00	50.00	0	50,000,000	50.00	50.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	13		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	14		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	15		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	16		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	17		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	18		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	19		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	20		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	21		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	23		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	24		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	25		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	26		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	27		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	28		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	29		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	30		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	31		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	32		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	33		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	34		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	35		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	36		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	37		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	38		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	39		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	40		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	41		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	42		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	43		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	44		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	45		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	46		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	47		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	48		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	49		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	50		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	51		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	52		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	53		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	54		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	55		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	56		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	57		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	58		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	59		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	60		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	61		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	62		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	63		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	64		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	65		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	66		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	67		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	68		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	69		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	70		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	71		Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Unit	50,000,000				Unit	20,000,000				0		0		0		20,000,000	100.00	40.00	0	20,000,000	40.00	40.00	Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Terkait Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Dilakukan
1	01	01	2.02	72		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkap

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	111,36	SANGAT TINGGI
REALISASI ANGGARAN	86,18	SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM)	134,14	SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)	108,17	SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN)	105,26	SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN	85,19	SANGAT TINGGI

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN : PERTANIAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Rencana 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Kerja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025 (rolisasi)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (rolisasi)	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Menjadi	Kerja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Kerja 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi**	%		12,35	17,24	43.272.515.162	44.261.831.914	36.458.941.985	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	12,09	57.831.604.409
1	27	03	223		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah luas areal tanam**	ha		99.306,00	82.774,00	28.191.463.823	18.116.411.773	13.041.734.044	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	297.920,00	36.395.719.153
1	27	03	223	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	laporan	1,00	1,00	1,00	23.300.412.189	13.214.460.439	6.289.068.323	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	8.500.000.000
						Jumlah peralatan yang difasilitasi	jenis	3,00	2,00	2,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	2,00	
						Jumlah pupuk non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani (Pupuk Hayati Cair)	liter		291.027,00	47.748,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	-	
1	27	03	223	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1,00	1,00	1,00	1.891.051.334	1.901.951.334	2.015.266.603	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	17.895.719.153
						Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian	unit	100,00		130,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	134,00	
1	27	03	223	03	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil I)	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ton	1,00	1,00	1,00	691.634.417	684.924.417	667.303.957	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	508.258.090
						Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)	ton	0,50	0,50	0,50				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	0,50	
						Jumlah Perbenihan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT II)	ton	0,50	0,50	0,50				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	0,50	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Rupiah								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
									Target 2020 (rupiah)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2020	Perubahan Renja 2020			Nasional	Daerah		Target (rupiah)	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah benih padi SBT I yang diproses sertifikasi (Mei-Juni)	ton	0,50	0,50	0,50				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	0,50	
						Jumlah benih padi SBT II yang diproses sertifikasi (Okt-Nov)	ton	0,50	0,50	0,50				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	0,50	
						Jumlah Bangunan Pengering Benih Kacang Tanah	unit			1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
1	37	03	3.03	07	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil XI)	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ton	64,00	60,00	60,00	1.203.002.000	1.176.162.000	1.070.113.161	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	60,00	1.200.000.000
						Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar	ton	37,00	35,00	35,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	35,00	
						Jumlah produksi bibit tanaman cabai dengan masa pemeliharaan dan distribusi periode Jan-Maret	ton	37,00	25,00	35,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	25,00	
						Luas lahan pembenihan dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des	Ha	12,00	12,00	12,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	12,00	
1	37	03	3.03		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat**	cluster komoditas		3,00	3,00	18.081.051.639	29.143.420.141	23.417.187.941	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	31.435.945.316
1	37	03	3.03	04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil V)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2,00	2,00	2,00	828.689.015	718.916.515	718.957.727	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	2,00	754.862.300
						Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag	polybag	1.500,00	3.000,00	3.000,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1.500,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Target 2024 (estimasi)		[illegible]			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Kinerja	Realisasi	Pagu 2025	[illegible]	Pendanaan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target (estimasi)	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah produksi [illegible] tanaman sayur dalam polybag	polybag	11.500,00	20.000,00	20.000,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	25.000,00	
		Jumlah [illegible]	unit		1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani		
		Jumlah produksi [illegible] tanaman [illegible] dengan [illegible] dan distribusi periode Jan-Maret	polybag	-	10.000,00	6.500,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani		
		Jumlah [illegible] tanaman [illegible] yang [illegible] (bulan)	jenis	-		4,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani		
		Jumlah pembibitan tanaman [illegible] dan pemeliharaan [illegible]	[illegible]			10.000										
[illegible]	[illegible] Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VIII)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan [illegible]	[illegible]	2,00	3,00	3,00	590.075.102	636.621.403	604.965.014	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	3,00	425.000.000
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap salur	pohon	30.000,00	20.000,00	20.000,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	28.000,00	
		Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan	pohon	28.000,00	43.000,00	29.000,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	28.000,00	
[illegible]	[illegible] SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil IX)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan [illegible]	[illegible]	2,00	3,00	4,00	800.544.310	604.225.513	632.178.187	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	2,00	675.000.000
		Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan [illegible]	batang	1.500,00	2.500,00	2.500,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	2.500,00	
		Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan	pot/polybag	2.500,00	2.000,00	2.380,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mewujudkan masyarakat [illegible]	Peningkatan kesejahteraan [illegible] masyarakat	Kelompok Tani	2.500,00	
		Jumlah green house yang dibangun	unit			1,00										

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Target 2026 Perubahan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renja							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Semula	Menjadi	Pagu Indikatif: Renja 2026	Perubahan Penjabaran APBD 2026	Perubahan Renja 2026	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas: Nasional	Prioritas: Daerah		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (UPT Pertanian Wilayah [illegible])	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	laporan	1,00	1,00	1,00	589.299.440	575.372.445	354.087.480	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	5,00	740.902.067
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	12,00	14,00	14,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	13,00	
		Jumlah alsintan yang diperbaiki	unit	95,00	50,00	50,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	65,00	
		Jumlah mobil bengkel keliling	unit		1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
		Jumlah suku cadang yang disediakan	jenis	13,00	17,00	13,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	11,00	
		Jumlah alsintan untuk brigade	unit	10,00	8,00	8,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	10,00	
		Jumlah bimtek alsintan	kali	5,00	7,00	4,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	5,00	
[illegible]	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil VI)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	1,00	1,00	565.775.007	477.207.712	486.431.902	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	657.715.090
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	4,00	14,00	14,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	14,00	
		Jumlah alsintan yang diperbaiki	unit	50,00	50,00	50,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	50,00	
		Jumlah suku cadang yang disediakan	jenis	7,00	7,00	7,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	7,00	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Target 2025 Semula	Target 2025 Menjadi	Pagu Indikatif Renja 2025	Pagu Indikatif Perubahan Pergeseran 2025	Pagu Indikatif Perubahan Renja 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah alsintan untuk brigade	unit	2,00	4,00	2,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	2,00	
		Jumlah bimbingan teknis alsintan	kali	3,00	3,00	4,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	
[illegible]	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil. X)	Jumlah Dokumen peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	1,00	1,00	[illegible]	[illegible]	338.320.979	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	750.000.000
		Jumlah UPJA yang dibina	UPJA	18,00	18,00	15,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	30,00	
		Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki	unit	90,00	60,00	50,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	60,00	
		Jumlah SAU (gedung dan alat perbengkelan)	paket	9,00	9,00	9,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	9,00	
		Jumlah alsintan untuk brigade	unit	3,00	4,00	2,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	2,00	
		Jumlah bimtek teknis alsintan	kali	3,00	2,00	2,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	
[illegible]	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	2,00	2,00	2,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	2,00	[illegible]
		Jumlah luas lahan benih padi yang disertifikasi (diasumsikan ..... benih sebanyak 50 Ha)	ha	5.000,00	27.840,70	4.398,70				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	[illegible]	
		Jumlah luas lahan benih palawija yang disertifikasi	ha	[illegible]	253,00	340,20				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	340,20	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Target 2025 (Tahunan)		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Rangka: Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah luas lahan bibit alpukat yang dibantukan	Ha	20,00	20,00	110,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	420,00	
		Jumlah luas lahan bibit durian yang difasilitasi	Ha	20,00	15,00	105,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	525,00	
		Jumlah luas lahan bibit pala yang dibantukan	Ha	20,00	10,00	87,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	10,00	
		Jumlah luas lahan bibit kopi yang dibantukan	Ha	33,00	10,00	86,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	70,00	
		Jumlah luas lahan bibit mangga yang dibantukan	Ha	20,00	20,00	70,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	120,00	
		Jumlah luas lahan bibit jagung hibrida yang dibantukan	Ha	50,00		300,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	306,20	
		Jumlah bibit durian yang ditanam	Ha			40,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	40,00	
		Jumlah bibit alpukat yang dibantukan	Ha	40,00		40,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	40,00	
		Jumlah bibit cengkeh yang difasilitasi	Ha			40,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	40,00	
		Jumlah bibit lemon yang difasilitasi	Ha			45,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	40,00	
		Jumlah bibit kangkung yang dibantukan	Ha	30,00		45,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	40,00	
		Jumlah bibit rambutan yang dibantukan	Ha			40,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	40,00	

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2030	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Ranja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
										Target 2025 (relasi)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (relasi)	Pagu Indikatif (Rp)
										Semula	Menjadi	Ranja (Rp)	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Ranja (Rp)			Nasional	Daerah			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah lifri manggo yang difasilitasi	ha			190,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	140,00	
							Jumlah bibit rambutan yang difasilitasi	ha			140,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	90,00	
							Jumlah bibit lengkeng yang difasilitasi	ha			81,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	30,00	
							Jumlah bibit jeruk limau yang difasilitasi				33,00										
							Jumlah bibit pisang yang difasilitasi	ha	10,00		20,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	110,00	
							Jumlah benih jagung manis yang difasilitasi	ha			61,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	75,00	
							Jumlah luas lahan yang difasilitasi mulsa				340,00										
							Jumlah peserta sosialisasi Mendukung Mandiri Penyediaan Benih Padi Unggul Bersertifikat				40,00										
1	07	03				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi**	%		60,32	16,53	3.409.186.417	6.593.048.696	7.004.722.148	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	65,00	8.235.602.304
1	07	03	03			**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian**	dokumen		3,00	3,00	880.933.330	773.051.100	773.193.993	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	600.000.000
1	07	03	03	01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Ditetapkan	dokumen	1,00	1,00	1,00	250.455.075	250.272.859	250.415.743	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	300.000.000
							Jumlah dokumen lahan sawah dilindungi dan data sawah update	laporan			1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
1	07	03	03	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	1,00	1,00	1,00	350.473.200	249.423.200	249.423.200	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	100.000.000
							Jumlah luas penanganan lahan tidak produktif	ha		5,00	5,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Rupiah								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2020 (setiap)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2020	Perubahan Renja 2020			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	03	203	38	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	dokumen	1,00	2,00	2,00	280.000.000	273.355.090	273.355.090	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	200.000.000
1	27	03	203		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang terbangun**	unit		21,00	305,04	4.528.252.087	5.819.997.587	6.231.528.155	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	60,00	7.635.602.304
1	27	03	203	39	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	31,00	0,00	13,00	1.775.803.244	2.352.483.244	2.352.483.244	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	19,00	3.741.037.929
1	27	03	203	73	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	unit	7,00	6,00	8,00	1.401.006.833	1.401.006.833	1.801.149.517	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	6,00	1.650.000.000
1	27	03	203	74	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	unit	3,00	3,00	3,00	790.879.811	782.219.811	782.219.811	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	793.136.379
1	27	03	203	80	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1,00	1,00	-	28.944.500	-	-	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	73.000.000
1	27	03	203	38	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	5,00	2,00	5,00	531.817.699	1.284.287.699	1.295.673.583	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	5,00	1.378.428.000
1	27	03			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan risiko bencana pertanian**	%		71,18	2,50	2.545.410.304	1.436.251.171	1.607.260.291	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	77,87	2.013.880.057
1	27	03	237		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian**	ha		20.000,00	1.590,00	2.545.410.304	1.435.251.171	1.607.260.291	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	44.000,00	2.013.880.057
1	27	03	237	80	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Wil I)	Jumlah luas serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	650,00	350,00	450,00	886.700.000	689.494.876	689.780.644	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	450,00	430.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Anak Perbaik Semester 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan dalam Kerja										Pendapatan Maja Kecamatan Tahun 2020	
					Target 2020 (sebelum)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Melampui Sasaran	Target (sebelum)	Pagu Indikatif (Rp)
					Semester	Menjadi	Kerja 2020	Perubahan Penjabaran Kerja 2020	Perubahan Kerja 2020			Pusatnya	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	15,00	8,00	7,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	7,00	
		Jumlah lokasi diterminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	15,00	12,00	7,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	7,00	
		Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	7,00	12,00	7,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	7,00	
		Jumlah gudang yang dibangun	unit	-	1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani		
		Jumlah jurang burung yang dibangun	unit	240,00	240,00	246,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	240,00	
[illegible]	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (OPT WILKO)	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang diserdaikan	Ha	750,00	600,00	500,00	541.239.370	436.709.361	438.995.129	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	500,00	596.297.057
		Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Gerakan	17,00	15,00	10,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	15,00	
		Jumlah lokasi diterminasi teknologi pengendalian OPT	Kelompok Tani	16,00	15,00	8,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	15,00	
		Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya	Kelompok Tani	12,00	8,00	8,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	10,00	
		Jumlah jurang burung yang dibangun	unit	300,00		300,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai sesuatu pangan, sesuatu energi, dan sesuatu air	Pemenuhan kemandirian pangan menuju sesuatu	Kelompok Tani	300,00	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2030	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Rupiah								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2026 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)
									Semula	Menjadi	Semula	Perubahan Penjabaran APBD 2026	Perubahan Semula 2026			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	09	01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	30.000,00	20.000,00	1.590,00	967.471.859	219.760.359	391.903.243	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	20.000,00	847.711.500
1	27	09	01	02	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	laporan	1,00	1,00	1,00	149.999.076	87.286.575	86.581.275	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	89.971.560
						Jumlah pompa air	unit	-	9,00	-				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	-	
9	27	09			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian**	%		60,05	13,49	3.014.022.958	1.720.735.867	1.569.738.967	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	75,05	2.890.000.000
1	27	09	01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian**	pelaku usaha		55,00	295,00	3.014.022.958	1.720.735.867	1.569.738.967	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	162,00	2.890.000.000
1	27	09	01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok sasaran pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	dokumen	4,00	4,00	4,00	377.699.630	257.052.830	277.738.598	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	4,00	550.000.000
1	27	09	01	02	Penilaian Kelayakan dan Penberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Penberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	1,00	1,00	1,00	1.590.025.580	742.065.932	572.389.537	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	1.290.000.000
						Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi lebun komoditas hortikultura	poktan/pelaku usaha	20,00	23,00	23,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	16,00	
						Jumlah pelaku usaha perkebunan	perusahaan	10,00	32,00	32,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	10,00	
						Jumlah pameran	kali	2,00	2,00	2,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan keterediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	2,00	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2030	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Renstra Tahun 2026	
									Target 2025 (rolasan)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target (rolasan)	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	17	18	123	10	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT WE IV)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1,00	1,00	1,00	610.978.842	460.504.692	458.548.719	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	500.000.000
						Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya	pelaku usaha	120,00	120,00	120,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	120,00	
						Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	16,00	10,00	6,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	8,00	
						Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	RK	7,00	7,00	7,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	7,00	
1	17	18	125	11	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UPT WE VII)	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1,00	1,00	1,00	435.318.906	261.092.113	261.062.113	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	500.000.000
						Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan ijin usahanya	pelaku usaha	120,00	120,00	120,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	80,00	
						Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	kali	8,00	6,00	6,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	8,00	
1	17	97			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian**	%		1,83	1,08	9.154.128.970	7.045.474.366	7.437.525.190	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,88	8.537.956.450
1	17	18	126		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian**	%		66,30		9.154.128.970	7.045.474.366	7.217.199.366	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	66,63	8.537.956.450
						Jumlah petani dan penyuluh yang meningkat kompetensinya				1.307,00			7.437.525.190							
1	17	18	127	9	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	13,00	13,00	13,00	3.724.269.609	3.443.440.609	3.745.016.293	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	13,00	3.545.095.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
					Semula	Menjadi	Pagu awal	Perubahan Perubahan APBD 2025	Penambahan / Pengurangan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	orang	190,00	190,00	190,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	190,00	
		Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan (Tingkat Kab, Kec, dan Desa)	buku	-	523,00	523,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	-	
		Jumlah Pertemuan rapat persiapan 2 mingguan BPP	kali	286,00	286,00	286,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	286,00	
		Jumlah penyuluh pertanian yang terukur kinerjanya dalam melaksanakan tugas	orang	190,00	363,00	363,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	190,00	
		Jumlah [illegible] ASN, THL-TBPP dan PPS terlatih	paket	3,00	9,00	9,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	3,00	
[illegible]	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok tani	100,00	100,00	100,00	2.053.140.826	2.140.272.509	1.082.618.255	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	100,00	1.900.000.000
		Jumlah pemberian petani milenial, gapoktan, poktan/desa, dan petani berprestasi	paket	4,00	7,00	7,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	7,00	
		Terfasilitasinya kegiatan [illegible]	kegiatan	1,00	2,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	-	
		Terfasilitasinya bibit untuk lomba-lomba tingkat provinsi	pohon/benih	1.050,00	2.100,00	2.100,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	1.050,00	
		Terfasilitasinya tersusunnya dokumen RDKK	dokumen	1.030,00	2.239,00	2.230,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	2.223,00	
		Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi	kegiatan	4,00	4,00	6,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan secara swasembada	Kelompok Tani	7,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan [illegible]									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun [illegible]	
					Target 2026 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
					[illegible]	[illegible]	Pagu 2026	Perubahan Penjabaran APBD 2026	Penambahan Pagu 2026			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terfasilitasinya perlombaan kontes tingkat kabupaten	Kegiatan	12,00	21,00	21,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	21,00	
		Diselenggarakannya pelatihan bagi petani	Angkatan	16,00	2,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	16,00	
		Jumlah pelaksanaan rembug sarasehan tingkat KTNA	Kegiatan		4,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
[illegible]	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	13,00	52,00	13,00	1.506.415.057	990.695.442	578.374.950	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	13,00	1.695.355.000
		Jumlah Demplot BPP yang terfasilitasi	unit	-	0,00	8,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
		Jumlah Pemeliharaan dan Penyelenggaraan lahan APH yang terlaksana	paket	1,00	1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	
		Jumlah bangunan pada lahan APH yang terpelihara	unit	1,00	1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	
		Jumlah Pengolahan Tanah Penyuluhan/Kandang yang terfasilitasi	HOK	650,00	1.340,00	390,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	650,00	
[illegible]	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Bekerjasama	unit	15,00	15,00	5,00	523.949.670	950.298.930	310.249.930	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	15,00	526.000.000
		Jumlah pelaksanaan [illegible]	kali	-	1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
[illegible]	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	150,00	150,00	200,00	481.604.650	958.290.675	905.290.675	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	190,00	378.552.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2030	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Atas Beban									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2030	
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Kantor Dinas	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)
									Semula	Menjadi	Biaya 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Biaya 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	17	231	07	Pengantar Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	unit		13,00	-	85.900.000	-	-	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani		
1	27	17	231	08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	unit	5,00	1,00	1,00	60.198.800	37.569.700	37.569.700	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	160.368.450
						Jumlah pelatihan pemanfaatan dan pengembangan KEP	kegiatan	5,00	3,00	3,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	5,00	
						Jumlah pelaksanaan pemberdayaan KEP	kegiatan	5,00	3,00	3,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	3,00	
1	27	17	232	08	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	dokumen	1,00	1,00	1,00	738.290.581	573.958.381	726.508.381	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	1,00	223.470.000
						Jumlah pelatihan petani milenial	kegiatan	6,00	3,00	3,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	6,00	
						Jumlah lomik dan demplot cabai	paket	-	1,00	1,00				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air	Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada	Kelompok Tani	-	
1	27	00			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	Poin		74,55	74,55	49.922.877.523	50.422.846.742	47.459.953.571	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	74,65	47.245.726.668
							Predikat		BB	BB				Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	BB	
1	27	17	233		**Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas**	%		100,00	100,00	361.996.584	295.499.837	296.331.870	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	100,00	311.148.464
1	27	17	233	17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	13,00	13,00	13,00	161.069.700	77.492.300	85.346.699	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	13,00	89.614.244
1	27	17	233	18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1,00	1,00	1,00	125.100.000	16.860.000	10.048.340	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	10.550.967
1	27	17	233	19	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2,00	2,00	2,00	14.303.150	20.190.000	14.859.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	15.601.950
1	27	17	233	20	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1,00	1,00	1,00	6.360.000	3.366.263	1.703.363	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	1.788.426

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Rupiah								Kelompok Sasaran	Perkiraan Biaya Renstra Tahun 2026	
									Target 2026 (rolisasi)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Semula	Menjadi	Renja 2026	Perubahan Penjabaran APBD 2026	Perubahan Renja 2026			Nasional	Daerah		Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	10	10	10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2,00	2,00	2,00	6.360.000	6.360.000	4.600.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	4.830.000
1	27	11	10	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	14,00	15,00	15,00	151.149.734	103.100.284	116.743.168	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	14,00	122.580.326
1	27	11	10	17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	17,00	17,00	17,00	97.663.000	68.131.000	63.031.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	17,00	66.182.550
1	27	11	10		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran perangkat daerah**	%	98,21	98,21	98,21	35.980.280.978	35.918.400.978	34.369.498.514	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	98,21	37.895.763.154
1	27	11	10	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	251,00	225,00	218,00	35.620.944.232	35.620.944.232	34.120.944.232	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	251,00	37.573.913.154
1	27	11	10	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan	12,00	12,00	12,00	185.434.377	160.784.377	152.539.029	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	12,00	182.600.000
1	27	11	10	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	2,00	2,00	2,00	36.308.699	32.973.699	33.116.543	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	35.000.000
1	27	11	10	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	1,00	1,00	3.749.650	1.889.650	1.889.650	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	3.750.000
1	27	11	10	08	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1,00	1,00	1,00	2.750.000	1.060.000	1.060.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	2.750.000
1	27	11	10	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12,00	12,00	12,00	97.724.360	97.394.360	56.794.360	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	12,00	95.000.000
1	27	11	10	12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1,00	1,00	1,00	3.369.700	3.184.700	3.184.700	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	3.350.000
1	27	11	10		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	%		90,00	90,00	3.620.250	3.620.250	3.620.250	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	90,00	3.800.000
1	27	11	10	03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2,00	2,00	2,00	3.620.250	3.620.250	3.620.250	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	3.800.000
1	27	11	10		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	%		100,00	100,00	561.651.850	176.001.850	231.701.850	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	100,00	539.850.000
1	27	11	10	15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	450,00	630,00	-	78.280.000	-	-	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	450,00	123.750.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2030	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Rupiah								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2030	
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif (Rp)
									Semula	Menjadi	Biaya 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Biaya 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	11	1.01	12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	300,00	1,00	-	157.500.000	-	-	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	300,00	220.000.000
1	27	11	1.01	13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2,00	2,00	2,00	32.126.250	29.506.250	29.506.250	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	32.400.000
1	27	11	1.01	14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2,00	2,00	2,00	16.824.000	7.924.000	7.924.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	8.700.000
1	27	11	1.01	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	350,00	330,00	350,00	20.000.000	13.000.000	9.850.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	380,00	14.300.000
1	27	11	1.01	16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	200,00	140,00	140,00	183.921.600	97.071.600	161.921.600	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	180,00	98.000.000
1	27	11	1.01	17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	12,00	10,00	3,00	75.000.000	22.500.000	22.500.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	5,00	37.500.000
1	27	11	1.01		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	%		100,00	100,00	1.681.266.648	1.758.809.161	1.583.552.073	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	100,00	1.722.712.200
1	27	11	1.01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	1,00	1,00	96.220.950	96.220.950	96.220.950	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	101.030.000
1	27	11	1.01	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3,00	3,00	3,00	257.962.250	257.962.250	257.962.250	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	3,00	260.000.000
1	27	11	1.01	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2,00	1,00	3,00	36.276.250	209.365.263	47.810.675	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	19.000.000
1	27	11	1.01	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2,00	2,00	2,00	114.838.386	114.838.386	114.838.386	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	2,00	120.580.300
1	27	11	1.01	15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	2,00	2,00	2,00	55.219.612	55.219.612	55.219.612	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah			Pegawai Dinas	2,00	56.000.000
1	27	11	1.01	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	dokumen	1,00	1,00	1,00	25.440.000	25.440.000	25.440.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah			Pegawai Dinas	1,00	26.712.000
1	27	11	1.01	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12,00	12,00	12,00	217.800.000	217.800.000	217.800.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah			Pegawai Dinas	12,00	228.690.000
1	27	11	1.01	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	2,00	2,00	2,00	813.518.600	699.144.000	699.144.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah			Pegawai Dinas	2,00	854.000.000
1	27	11	1.01	20	Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	dokumen	1,00	1,00	1,00	58.741.200	58.741.200	58.741.200	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah			Pegawai Dinas	1,00	31.500.000
1	27	11	1.01	21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	dokumen	1,00	1,00	1,00	3.250.000	24.077.500	10.375.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	1,00	20.200.000
1	27	11	1.01		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan**	%		100,00	100,00	5.431.864.825	5.619.647.538	5.379.097.238	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	100,00	1.082.690.000
1	27	11	1.01	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	6,00	3,00	3,00	303.480.000	303.480.000	280.800.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	4,00	371.520.000
1	27	11	1.01	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	10,00	5,00	-	166.974.000	-	-	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	5,00	197.500.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2030	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Awal Renja							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2030	
									Target 2025 (sebelum)		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah		Target (rekomen)	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	27	22	109	04	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	63,00	608,00	306,00	824.784.975	1.104.368.728	795.579.820	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	43,00	136.800.000
1	27	22	107	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	42,00	549,00	231,00	4.136.625.850	4.311.798.850	4.302.717.418	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	32,00	377.170.000
1	27	22	106		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%		100,00	100,00	2.469.960.388	2.469.960.388	2.312.732.776	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	100,00	3.547.762.750
1	27	22	106	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	12,00	12,00	712.155.000	712.155.000	643.583.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	12,00	747.762.750
1	27	22	106	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	12,00	12,00	1.757.805.388	1.757.805.388	1.669.149.776	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	12,00	1.800.000.000
1	27	22	230		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	%		100,00	100,00	3.283.230.000	4.186.906.700	3.282.419.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	100,00	3.142.000.000
1	27	22	230	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	207,00	176,00	176,00	684.500.000	684.500.000	596.500.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	181,00	692.000.000
1	27	01	230	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	20,00	11,00	10,00	2.383.041.000	2.195.345.700	2.379.859.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	20,00	2.140.000.000
1	27	22	230	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	320,00	294,00	295,00	296.695.000	306.060.000	306.060.000	Kabupaten Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pegawai Dinas	296,00	310.000.000
											113.319.140.334	111.479.188.487	101.557.142.162							126.754.056.313

Catatan : Peraturan Buku II Perkap Nomor 14 Tahun 2024 tentang SSPD Kab. Bogor Tahun 2025

Petunjuk pengisian :

Kolom 1 : Diisi dengan kode kegiatan sesuai dengan Kepmen 050-5889 tahun 2021
2 : Diisi dengan nama program, nama kegiatan dan nama sub kegiatan
3 : Diisi dengan indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan
4 : Diisi dengan satuan
5 : Diisi dengan volume target pada akhir periode Renstra di tahun 2030
6 : Diisi dengan volume target kinerja pada Renja Tahun 2025 sebelum perubahan
7 : Diisi dengan volume target kinerja pada Renja Tahun 2025 setelah perubahan
8 : Diisi dengan jumlah anggaran pada Renja Tahun 2025 sebelum perubahan
9 : Diisi dengan anggaran pada APBD Tahun 2025 sebelum penyesuaian (APBD Tahun 2025 murni)
10 : Diisi dengan anggaran pada perubahan Renja tahun 2025
11 : Diisi dengan nama lokasi terakhir yang berubah
12 : Diisi dengan sumber dana
13 : Diisi dengan prioritas nasional tahun 2025 yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2025
14 : Diisi dengan prioritas Kabupaten Bogor tahun 2025 yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2025
15 : Diisi dengan kelompok sasaran yang berubah
16 : Diisi dengan volume target yang terdapat pada Renstra untuk tahun 2030
17 : Diisi dengan anggaran yang terdapat pada Renstra untuk tahun 2025